LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Muhammad Asep Bachtiar

121211069

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO

SEMARANG

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Juli 2018

Penulis,

Muhammad Asep Bachtiar

121211069

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Dengan bimbingan dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat-Nya.

Sebuah kebahagiaan bagi penulis, karena tugas dan tanggung jawab penulis untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dapat menyelesaikan dengan baik, dengan judul skripsi: "Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah".

Penulis menyadari skripsi ini tidaklah mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Primay, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A. selaku Ketua Jurusan KPI dan Bapak Nur Cahyo Hendro Wibowo, S.T., M.Kom. Selaku Sekretaris Jurusan KPI yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rustini Wulandari, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi pada program S1 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

6. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan komunikasi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, sehingga mempermudah penulis dalam mencari referensi terkait penulis.
7. Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, Bapak Asep Cuswantoro, S. Pd.I., Muhammad Rofiuddin, M.I.Kom., Dini Inayati, S.T. dan seluruh staf yang telah memberi izin dan meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Ayahanda Achmad Waridi dan Ibunda Warti selaku orang tua, kakak dan semua orang yang saya sayangi yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, support, dan doanya sehingga skripsi ini selesai.
9. Ketiga kakak saya yaitu Romadhoni Santoso, Nurjanah, dan Bambang Hermanto yang telah bersedia menemani, mengingatkan, memberikan support dan doanya.
10. Keluarga besar KPI-B angkatan 2012 (Latif, Hasyim, Mazka, Mughis, Fadli, Fariz, Aziz, Afif, Dody, Rohman, Nadhif, Najih, Habib, Rosyid, Afifah, Latifah, Eli, Sofi, Eka, Sausan, Lilis, Ina, Afah, Ma'sumah, Tuti, Laila, dan kawan-kawan).

Dengan iringan do'a mudah-mudahan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis, semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT, berupa pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, penulis menyadarai bahwa dalam proses awal sampai akhir penulisan skripsi ini jauh dari sempurna maka dengan besar hati penulis menerima masukan yang membangun dari pembaca agar lebih baik.

Semoga skripsi ini bermanfaat di kemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 19 Juli 2018
Penulis,

Muhammad Asep Bachtiar
NIM. 121211069

PERSEMBAHAN

Kubersembahkan karya kecil ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Achmad Waridi dan Ibu Warti, yang telah mengasuh, mendidik, memberikan semangat, somoga rangkaian kata ini dapat menjadi bukti atas kerja kers, kasih sayan dan doa bapak ibu yan tidak pernah terbalas.
2. Ketiga kakak saya yaitu Romadhoni Santoso, Nurjanah, dan Bambang Hermanto, yang telah bersedia menemani, mengingatkan, memberikan support dan doanya.
3. Ketiga anak kecil yang selalu menghibur penulis, yakni Lyta, Haidzar dan Adhwa. Mereka semua adalah keponakan penulis.
4. Amaliyah Nurul Azizah yang selalu memotivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dan senantiasa menjadi sumber inspirasi.
5. Almamaterku, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Walisongo Semarang.
7. Tim PPL di Diponegoro Channel (Azis, Tareh, Adit, Kutsi, dan Latifah)
8. Tim KKN angkatan ke-66 posko 44 Desa Jetak Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati (Wahab, Hamzah, Anam, Fina, Susi, Novi, Nanda, Nia, Ma'sumah, Dian, Wiji, dan Irma).
9. Anggota Pendam IV/ Diponegoro, Crew Diponegoro Channel (Mentari, Ika, Rizky, Azeem, Arif, Umam, dan Syehful), dan Crew Radio Suara Diponegoro (Aulia, Putri, Konan, Mas Ivan, dan Mba Janet).

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(Sabda Rasulullah)

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Asep Bachtiar
NIM : 121211069
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Televisi Dakwah
Judul : Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 19 Juli 2018
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi	Bidang Metodologi dan tata Tulis
Dr. H. Najahan Musyafak, M.A	Rustini Wulandari, S.Sos., M.Si
NIP. 19701020 199503 1 001	NIP. 19740821 200312 2 001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang kegiatan literasi media yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah kepada

lembaga penyiaran dan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan literasi media. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses kegiatan literasi media yang diadakan oleh KPID Jawa Tengah, mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan bentuk visualisasi kegiatan kepada lembaga penyiaran dan masyarakat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa.

Peneliti berusaha memahami alur kegiatan literasi media yang dilakukan KPID Jawa Tengah untuk membuat lembaga penyiaran dan masyarakat menjadi paham akan pentingnya literasi media. Penelitian ini secara deskriptif menerangkan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan oleh KPID kepada target sasarannya. Data penelitian ini didapatkan berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi mengenai kegiatan dan proses keberlangsungan kegiatan literasi media. Data yang didapatkan peneliti dari *key informant* yaitu penggagas kegiatan literasi media yaitu Ketua KPID Jawa Tengah dan informan pendukung adalah Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran ditambah dengan bidang literasi media dan masyarakat pemerhati fenomena penyiaran. Hasil penelitian ini yaitu, Kegiatan literasi media telah dijalankan sesuai rencana, namun pelaksanaan evaluasinya tidak berjalan dengan semestinya, karena belum ada perubahan signifikan yang ditunjukkan baik dari lembaga penyiaran, masyarakat atau KPID Jawa Tengah sebagai pelaksana kegiatan literasi media.

Kata Kunci : Literasi Media, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
PERSEMBAHAN vii
MOTTO viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
BAB I
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 5
Tujuan Penelitian 5
Manfaat Penelitian 5
Tinjauan Pustaka 6
Metode Penelitian..... 10
Jenis dan Pendekan Penelitian 10
Definisi Konseptual 10
Kegiatan Literasi Media 10
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah 11
Sumber dan Jenis Data 11
Sumber Data Primer 11
Sumber Data Sekunder 12
Teknik Pengumpulan Data 12
Observasi 12
Wawancara 13
Dokumentasi 13

Teknik Analisis Data 14
BAB II
LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH..... 16
Literasi Media 16
Pengertian Literasi Media 16
Elemen Literasi Media 21
Tujuan Literasi Media 23
Konsep Manajemen
Pengertian Manajemen 26
Unsur-Unsur Manajemen 28
BAB III
LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH 55
Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 55
Sejarah Berdiri Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 55
Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 58
Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 59
Sarana dan Prasarana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 61
Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 61
Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 63
Perencanaan Kegiatan Literasi Media 66
Realisasi Target dan Sasaran 67
Hambatan 67
Rekomendasi 67
Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia 68

Tujuan Kegiatan Literasi Media 68
Target dan Sasaran 69
Pelaksanaan 69
BAB IV
ANALISIS LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH 77
Analisis Perencanaan Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah 77
Analisis Pelaksanaan Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Dearah (KPID) Jawa Tengah 78
BAB V
PENUTUP 96
Kesimpulan 96
Saran 97
Penutup 98
DAFTAR PUSTAKA 100
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Da'i atau subjek dakwah adalah pelaksana dari kegiatan dakwah, baik secara individu maupun organisasi (Sanwar, 2009: 92). Secara normatif, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan bagian dari subjek dakwah yang dimaksud. Hal itu dapat dilihat dari anggapan masyarakat umum bahwa mahasiswa fakultas tersebut dirasa mampu dalam berdakwah (sebagai mubaligh), meski aktivitas dakwah sebenarnya bukan terbatas pada ceramah saja.

Aktivitas dakwah menyangkut bidang-bidang yang luas, maka aktivitas dakwah membutuhkan penanganan yang lebih cermat dan perhatian yang lebih serius sesuai dengan perkembangan zaman yang banyak diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini dan mendatang (Sanwar, 2009: 95).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa dampak positif bagi kehidupan, sebaliknya juga akan membawa dampak negatif apabila manusia berbuat kesalahan dalam mempergunakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya terwujud dalam perkembangan media massa yang semakin pesat dan beragam. Sebagaimana Tamburaka (2013: 1) menuturkan bahwa pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi sengaja dibuat oleh media massa untuk tujuan tertentu. Fungsi media tidak hanya memberikan informasi dan hiburan semata, tetapi juga mengajak khalayak untuk melakukan sesuatu maupun mengubah perilakunya. Melalui beragam konten media yang dibingkai secara unik dan menarik sehingga mampu mempengaruhi pikiran dan perasaan khalayak.

Masyarakat sebagai subjek dakwah (*da'i*) harus mampu menghindari dampak negatif media massa sebagai cara untuk menjaga kualitas pribadinya sehingga kemudian akan mampu melindungi objek dakwahnya (*mad'u*) dari pengaruh negatif media. Selain sebagai subjek dakwah, sehingga sudah

seharusnya masyarakat memiliki konsep literasi media yang baik dalam menghadapi tantangan pesatnya perkembangan media yang memiliki pengaruh kuat baginya.

Media menjadi suatu kebutuhan hampir pada seluruh masyarakat, kalangan atas, tengah, dan bawah. Masyarakat membutuhkannya untuk tujuan mencari informasi, seperti berita, dan hiburan. Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah behasil mengatasi keterbatasan jarak dan waktu yang cepat, tetapi disisi lain mempertajam ketidakseimbangan arus informasi.

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan dan mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan (Liweri, 1991 : 143).

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari suatu sumber kepada khalayak banyak dengan menggunakan saluran media massa. Televisi merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan hiburan. Selain itu sifat negatif televisi adalah sepintas lalu, tidak terlalu dapat diterima dengan sempurna, dan menghadapi publik yang heterogen (Dominick, 2000: 192). Menurut Mar'at, televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, dan perasaan para penonton (Nasution, 1993: 6). Televisi sebagai media sosialisasi dan hiburan yang bersifat terbuka dan terarah.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan media dengar, pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan (Budhijanto, 2010: 79). Televisi merupakan

media komunikasi massa yang berkembang baik dilihat dari jumlah penggunaannya, variasai program-program acaranya, daya jangkau siarannya serta jumlah stasiun televisi yang ada, baik televisi lokal maupun internasioal. Masyarakat mengkonsumsi media televisi berawal dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, dari anak-anak hingga orang tua.

Kedekatan media televisi dengan masyarakat yang sangat erat tersebut selain membawa dampak baik juga membawa dampak buruk. Informasi yang disajikan dalam televisi atau media elektronik belum tentu benar adanya. Apabila sang penerima informasi tidak melakukan *cross check* maka dapat terjadi kesalahan persepsi yang dampaknya tentu saja tidak baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Siaran televisi harus mengandung informasi, pendidikan, agama, hiburan yang bermanfaat bagi pembentukan intelektualitas, watak, moral dan kemajuan karena sebuah siaran televisi yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh masyarakat, maka dari itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam memelihara nilai moral, kepribadian, tata susila, budaya dan kesatuan bangsa serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Realitanya, sering ditemukan program-program kurang berkualitas yang dinilai kurang mendidik seperti, acara “Anak Langit” yang menjadi tren para remaja. Acara ini menyuguhkan kepada pemirsa tentang sekelompok geng motor yang sering melakukan tawuran. Hal ini bisa menjadi dampak buruk bagi anak-anak yang menonton karena bisa meniru kelakuan para tokoh yang terdapat di acara tersebut. Ada pula tayangan yang berbau kriminal, acara gosip artis, sinetron yang tidak mendidik dan acara kuis yang sekarang ini masih terjadi, padahal Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa acara kuis seperti itu haram hukumnya karena mengandung unsur perjudian, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al- Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah: 90). (Depag RI: 1989)

Melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut akan berdampak negatif bagi para penonton, seperti contoh anak-anak kecil, mereka memiliki daya tiru yang sangat baik, dikhawatirkan mereka akan meniru apa saja yang mereka lihat di televisi dan mengikuti perilaku atau kata-kata dalam acara tersebut, hal ini akan berdampak buruk terhadap perilaku mereka.

Kehadiran televisi dapat mempengaruhi kognisi dan psikomotorik masyarakat. Televisi juga mempunyai peran yang sangat efektif dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi bagi pemirsanya. Tayangan televisi belakangan ini banyak menyajikan tayangan yang kurang mendidik bagi masyarakat. Melihat dari program siaran televisi sehari-hari masih banyak yang belum memberikan tayangan bermanfaat bagi masyarakat dan masih banyak menayangkan hiburan yang kurang memberikan nilai edukatif kepada masyarakat. (wawancara dengan Asep Cuswantoro).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menganalisis tentang Literasi Media karena KPID menerapkan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka KPID bermaksud membuat masyarakat agar lebih cerdas dalam mengkonsumsi media (televisi).

Berdasarkan perihal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah. Banyaknya tontonan-tontonan di televisi menjadi menarik untuk dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini atau sebaliknya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Literasi Media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoretis

   Hasil pelaksanan Literasi Media KPID ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan khususnya di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Manfaat praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat data tentang Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah kepada masyarakat dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujan dari tinjauan pustaka adalah menghindari terjadinya plagiasi, aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan peneliti sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

Guna kajian pustaka adalah membandingkan, menyatakan bahwa skripsi ini perumusan masalah berbeda, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan dalam penelitian. (Jauhari, 2001:55). Berikut penelitian yang ada keterkaitannya dengan judul penelitian tersebut:

Pertama, Rahmi (2013) melakukan kajian dengan judul "Pengenalan Literasi Media Pada Anak Usia Sekolah Dasar". Artikel tesebut membahas kemampuan untuk melakukan kemelek mediaan yang ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media massa termasuk anak-anak menjadi sadar bagaimana cara media dikonstruksi/ dibuat dan diakses. Literasi media harus dikembangkan dalam masyarakat kita karena tidak seorang pun manusia dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi telah melek media, "*No one is born media literate*".

Mengajarkan pada anak-anak usia Sekolah Dasar dan sederajat (MI) menjadi sangat strategis, karena mereka adalah anak yang tengah tumbuh dengan pesat secara biologis maupun psikis. Mereka suka meniru, tanpa berupaya mengkritisinya terlebih dahulu. Orang tua dan guru merupakan pihak yang paling dekat dengan anak. Anak seumuran SD bahkan lebih sering patuh kepada gurunya bila dinasihati. Oleh karena itu guru SD dapat menyisipkan materi literasi media saat mengajar di kelas dengan model penayangan audio visual film kartun yang banyak digemari anak-anak, dan dialog kepada murid setelah menyaksikan tayangan tersebut. Jadi tidak perlu kita menyalahkan media begitu saja karena itu tidak adil. Media bisa bermanfaat (bahkan sangat

banyak manfaatnya, seperti untuk pendidikan, sumber informasi dan inspirasi, kontrol sosial), namun sekaligus bisa sangat merugikan penontonnya.

Perbedaan penelitian Rahmi dengan penelitian ini adalah, dalam penelitian diatas menggunakan objek pada anak-anak usia Sekolah Dasar, sedangkan dipenelitian ini menggunakan objek lembaga pemantauan, yaitu KPID Jawa Tengah. Persamaan dengan penelitian ini adanya kesamaan dalam konsep Literasi Media

Kedua, Murjiatun (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Sistem Penyiaran Radio Oleh KPID Yogyakarta". Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian pada analisis dan pembahasan yang meliputi cara kerja yang dilakukan KPID DIY dalam mengawasi sistem penyiaran radio di Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu mengumpulkan data yang sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda. Pengawasan dalam penelitian ini adalah menilai kinerja yang dilakukan KPID dalam sistem penyiaran radio sesuai dengan UU no 32 tahun 2002 pasal 8 (2) (3) yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Murjiatun adalah dalam penelitian diatas berfokus pada sistem pengawasan radio, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kegiatan literasi media televisi. Kesamaan terletak pada lokus objek penelitian.

Ketiga, Suryadi (2013) melakukan penelitian dengan judul "Kajian Perilaku Menonton Televisi Dan Pendidikan Literasi Media Pada Remaja" Relasi anak dengan televisi telah menjadi persoalan yang problematik. Di satu sisi televisi adalah sarana transformasi ide, nilai, norma, dan transformasi mental ke arah penyadaran, pencerahan, dan kemajuan kehidupan. Namun disisi lain televisi menularkan pengaruh buruk yang mendegradasi format kemanusiaan dan kemampuan berpikir anak. Dampak buruk media massa tersebut, terutama televisi melahirkan gagasan yang disebut *media literacy*.

Suatu keterampilan yang diperlukan setiap orang dalam interaksinya dengan pesan media massa, di mana seseorang dapat memilih tayangan yang positif dan mampu secara kritis menilai tayangan televisi yang relevan, baik ditinjau dari segi psikologi, etika, ekonomi dan agama. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi dampak negatif pengaruh tontonan televisi bagi siswa SMP serta dapat memberikan alternatif solusi bagi khalayak terhadap dominasi media massa dalam mengembangkan, baik pemahaman kritis maupun partisispasi aktif, sehingga memampukan anak muda sebagai konsumen media membuat penafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya.

Terletak pada objek penelitian yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian Suryadi yaitu pendidikan literasi media pada anak usia remaja, sedangkan dalam penelitian ini berobjek penelitian pada kegiatan literasi media oleh KPID kepada masyarakat luas, tidak hanya pada anak usia remaja.

Keempat, Kurniawati (2016) melakukan penelitian dengan judul "Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu" Survei mengenai literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai media digital, dan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat *individual competence* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam meliterasi media digital, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat *individual competence* terkait literasi media digital. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei deskriptif dan mempergunakan teknik analisis data statistik deskriptif untuk menganalisis data penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). Pemahaman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengenai media digital berada pada kategori sedang, 2). Tingkat *individual competence* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam meliterasi media digital berada dalam *level*

basic, 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *individual competence* terkait literasi media digital terutama adalah faktor lingkungan keluarga.

Kelima, Praktik Literasi Media di Lingkungan Keluarga (Studi Tentang Praktik Literasi Media oleh Ibu-Ibu Rumah Tangga Binaan Mayarakat Peduli Media (MPM) Pasca Program Pendidikan Literasi Media Untuk Televisi Januari 2011-Februari 2012 di Desa Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta). Masyarakat Peduli Media (MPM) menerapkan pendidikan media literasi dengan melakukan pembinaan terhadap ibu-ibu untuk tidak sekedar paham dan kritis terhadap media namun juga menjadi aktivis media literasi. Program MPM menjadikan ibu-ibu sebagai subjek dalam menjalankan program literasi media. Pihak ibu yang dibekali kemampuan literasi maka ia akan dapat melakukan pendampingan ketika anak-anak menonton televisi. penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi bagaimana ibu rumah tangga yang telah mendapatkan pendidikan literasi media untuk televisi (Januari 2011-Februari 2012) dalam praktik literasi media di lingkungan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang dibangun keempat ibu rumah tangga di lingkungan keluarganya bervariasi. Mediasi literasi yang dipraktikkan keempat ibu rumah dalam keluarga juga dilakukan dengan beragam gaya. Keempat ibu rumah tangga dalam praktik literasi media di lingkungan keluarga memiliki faktor pendukung dan penghambat yang tidak mudah diatasi. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan keluarga, dan adanya kesepakatan dalam keluarga mengenai televisi. Sementara faktor penghambat yang dialami ibu keempat ibu rumah tangga yang telah diteliti adalah faktor lingkungan sekitar, faktor program televisi yang ditawarkan stasiun TV, dan ketepatan dalam memberikan pengertian dan alasan pada anak serta masih ada pihak keluarga yang belum kompak dalam menerapkan peraturan menonton TV.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah hanya berfokus pada lingkungan keluarga yang menjadi sasaran kegiatan literasi media, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sasarannya adalah semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan selama penulisan (Moleong, 2007:3). Penulis menguraikan serta mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kegiatan literasi media yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Tahun 2018. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah suatu usaha untuk memahami individu, kehidupan atau pengalaman seseorang melalui persepsi untuk mengetahui dunia yang dijalani oleh individu perlu mengenal persepsi mereka terhadap sesuatu (Creswell, 1998: 213).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjelaskan konsep dengan kata-kata atau istilah lain atau sinonimnya yang dianggap sudah dipahami oleh pembaca (2000: 29). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

a. Literasi Media

Literasi media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah definisi literasi media menurut Lawrence Lessig yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pengguna media menjadi sadar tentang cara media dikonstruksi dan diakses (Tamburaka, 2013: 8).

Literasi media dalam penelitian ini adalah terkait kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menganalisis tayangan media yang

mereka konsumsi agar dapat memilah memilih tayangan yang baik atau layak untuk dikonsumsi.

Literasi media diperlukan agar pembaca, penonton, atu konsumen informasi media menyadari hal-hal sebagaimana dikemukakan *Association for Media Literacy* (2017):

b. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan disetiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam penelitian ini menganalisis tentang Literasi Media karena KPID menerapkan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan tentang "mencerdaskan kehidupan bangsa" maka KPID bermaksud membuat masyarakat agar lebih cerdas dalam mengkonsumsi media (televisi).

3. Sumber dan Jenis Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hal-hal yang berkaitan dengan penelitian (Idrus, 2009: 61).

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang utama yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang mana data tersebut diambil dari sumber data utama (Azwar, 2001: 91). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kegiatan Literasi Media yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah tahun 2018.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2011: 91). Sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini kaitannya dengan literasi media. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa laporan-laporan, foto-foto, buku-buku, profil atau literatur lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Adapun sebagai kelengkapan dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data tersebut dengan menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya (Subagyo, 1991: 63).

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi, atau intensi atau kecendrungan perilaku tidak dapat diobservasi. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan yang tanpa tujuan bukan merupakan observasi Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site)* yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung,

individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2012:131-132).

Observasi yang dimaksud untuk dalam penelitian ini, peneliti mengadakan peninjauan dan penelitian langsung ke lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah terkait kegiatan Literasi Media guna memperoleh data dan informasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meoleong, 2013:186).

Wawancara dilakukan terhadap sumber data terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang apa saja mengenai kegiatan literasi media KPID Jawa Tengah. Sedang yang menjadi subyek untuk diwawancarai adalah komisioner KPID, sekretariat bagian tenaga pemantau, akademisi, dan lembaga Pengawasan penyiaran televisi KPID Provinsi Jawa Tengah dan semua yang terlibat dalam kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Tengah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang gambaran umum KPID Provinsi Jawa Tengah, program kerja, laporan kerja, buku anggota, struktur

organisasi, serta arsip lainnya yang dimiliki KPID Provinsi Jawa Tengah terkait kegiatan literasi media.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian mengikuti model analisis *Miles and Huberman* (Sugiyono, 224: 2013). Yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing atau verification*).

Tahap reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak diperlukan.

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi dan wawancara tentang kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Tengah. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

Tahap penyajian data (*data display*). Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Pada tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan kegiatan literasi media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.

Tahap penarikan kesimpulan (*conclusion drawing atau verification*), pada tahap ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini peneliti dapat menjawab rumusan penelitian

dengan lebih jelas berkaitan dengan kegiatan literasi media oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah.

BAB II
LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

A. Literasi Media

1. Pengertian Literasi Media

Literasi media berasal dari bahasa Inggris yaitu *Media Literacy*. *Media* berarti tempat pertukaran pesan dan *Literacy* berarti melek. Dalam hal ini literasi media merujuk pada kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa dalam konteks komunikasi massa (Tamburaka, 2013: 7).

Sementara Baran dan Dennis (2010: 418) memandang literasi media sebagai suatu rangkaian gerakan melek media. Artinya gerakan melek media dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Cara pandang seseorang terhadap pesan media massa menentukan pula cara dia dalam menyikapi setiap pesan yang ia terima dan bagaimana dia bersikap. Sering kali persepsi khalayak dibentuk oleh pesan media massa, gambaran realita yang ditampilkan berita, iklan dan film kemudian membentuk persepsi terhadap sebagian orang tentang cara dia memandang dunia nyata (Baran, 2010: 311 dalam Tamburaka).

Kementerian Pendidikan Kanada menyebutkan literasi media adalah berkenaan dengan membantu para siswa untuk mengembangkan pemahaman kritis dan cukup informasi atas watak media massa, teknik yang dipakai media massa dan dampak penggunaan teknik-teknik tersebut. Secara lebih khusus, literasi media adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa atas cara kerja media, cara media memproduksi makna, cara media diorganisasikan dan cara media mengonstruksi realitas (Hobbs, 1999). Pada dasarnya definisi tersebut bisa diringkaskan seperti definisi yang dibuat dalam *National Leadership Conference on Media Education* yang menyatakan literasi media sebagai

kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengomunikasikan pesan dalam pelbagai bentuknya. Kedua definisi tersebut hanya berbeda penekanannya saja. Definisi yang diberikan Kementerian Pendidikan Kanada lebih pada tujuan melek-media, sedangkan definisi yang dikutip Hobbs lebih menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang yang melek-media (Iriantara, 2009: 17).

Iriantara (2009: 13) mengatakan, literasi media merupakan upaya pembelajaran bagi khalayak media yang berdaya hidup di tengah dunia yang disebut dunia sesak-media (media-saturated). Pembelajaran bagi khalayak media tersebut dinamai dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai media *education*, *paedagogy of media literacy*, *media studies*, dan *media literacy*. Namun perbedaan istilah tersebut tidak menunjukkan perbedaan substansial kegiatan yang bertujuan membuat khalayak media memiliki kompetensi yang dinamakan melek-media.

Definisi berbeda ada dalam Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang No. 32/2003 tentang Penyiaran, yang memaknai literasi media sebagai "kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat". Artinya penekanannya lebih pada proses untuk mencapai kondisi literasi media. Sedangkan *American Academy of Pediatrics* mendefinisikan melek-media sebagai *"the study and analysis of mass media"*. Ada pula definisi yang dibuat salah satu institusi gerakan literasi media yakni *Center for Media Literacy* yang merumuskan literasi media sebagai kemampuan berkomunikasi secara kompeten melalui semua media di samping juga kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi suara, kata-kata dan gambar yang berpengaruh hingga membentuk kultur media massa kontemporer.

Konsep literasi media yang dikonsepkan *Center for Media Literacy*/CML (CML: 2003) mencakup:

a. Kemampuan mengkritik media
b. Kemampuan memproduksi media

c. Kemampuan mengajarkan tentang media
d. Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan pesan media
e. Kemampuan mengeksplorasi berbagai sisi
f. Kemampuan berpikir kritis atas isi media.

Literasi media, seperti yang dikutip Tamburaka (2013: 37) diukur dan dievaluasi oleh para penggiat media melalui beberapa dimensi berikut:

a. Dimensi motivasi, mengacu pada tindakan bermedia seseorang atau sebuah kelompok. Pada bagian ini dapat diketahui tujuan seseorang dalam mengakses media, meliputi kesadaran atas manfaat media; startegi pencarian informasi; serta kemampuan dalam memahami fungsi-fungsi media.
b. Dimensi pengetahuan, dapat diterjemahkan sebagai sebuah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Dalam kaitannya dengan literasi media, pengetahuan dapat diartikan pemahaman terhadap proses komunikasi massa; pemahaman terhadap karakteristik media (produksi, gramatika dan rutinitas); pemahaman terhadap dampak media massa; pemahaman terhadap kontribusi media pada budaya kontemporer; dan pemahaman terhadap konstruksi realita yang dilakukan oleh media.
c. Dimensi keterampilan, terdapat kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, mengomunikasikan, mengategorikan, memadukan, dan mengkritisi media. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan pencapaian yang akan dapat dilakukan dengan lebih baik jika seseorang memiliki skill. Sementara, pada level advanced diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam mengkritisi media dan melakukan sesuatu yang dapat berdampak pada khalayak media. Misalnya, melaporkan konten media yang bermasalah ke lembaga terkait.

Literasi media dapat diukur menggunakan Individual Competence Framework dalam Final Report Study on Assesment Criteria for Media Literacy Levels tahun 2009 yang dilaksanakan oleh European Comission. Sebagaimana diterjemahkan Lutviah (2011) dari Final Report Study on

Assesment Criteria for Media Literacy Levels, Individual Competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan, memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media. Individual competence terbagi ke dalam dua kategori:

a. Personal competence, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan media dan menganalisis konten-konten media.

   Personal competence terdiri dari dua kriteria:

   1) *Technical skills*, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Artinya seseorang mampu mengoperasikan media dan memahami semua jenis instruksi yang ada di dalamnya. Technical skills ini mencakup beberapa kriteria, di antaranya:

      a) Kemampuan menggunakan komputer dan internet (computer and internet skills)
      b) Kemampuan menggunakan media secara aktif (balanced and active use of media)
      c) Kemampuan menggunakan internet yang tinggi (advanced internet use)

   2) *Critical understanding*, yaitu kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media.

      Kriteria critical understanding antara lain adalah:

      a) Kemampuan memahami konten dan fungsi media (understanding media content and its functioning)
      b) Memiliki pengetahuan tentang media dan regulasi media (knowledge about media and media regulation)
      c) Perilaku pengguna dalam menggunakan media (use behavior)

   3) *Social competence*, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu memproduksi konten media. Social competence terdiri dari *Communicative Abilities*, yaitu kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media.

Kriterianya mencakup:

a) Kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi sosial melalui media (*social relations*)
b) Kemampuan berpartisipasi dengan masyarakat melalui media (*citizen participation*)
c) Kemampuan untuk memproduksi dan mengkreasikan konten media (*content creation*)

Pada dasarnya, istilah literasi tersebut dipergunakan karena melihat hakikat kemampuan membaca dan menulis itu adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan. Mulanya, pesan disampaikan secara lisan. Namun setelah manusia menemukan huruf, pesan yang berupa informasi dan ilmu pengetahuan itu pun dikomunikasikan melalui huruf. Sekarang, manusia bertukar informasi dan pengetahuan bukan hanya melalui huruf melainkan juga melalui pesan visual seperti citra bergerak. Oleh karena itu, penggunaan istilah literasi ini pun semakin luas. Literasi dalam artian keaksaraan disebut literasi lama. Sedangkan literasi baru seperti literasi media merupakan "keaksaraan" yang tidak hanya menggunakan huruf atau aksara saja melainkan citra visual (Iriantara, 2009: 3-4).

Lamb (2003) dalam Iriantara (2009: 5) menyatakan definisi literasi sebagai kemampuan menempatkan mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan melalui berbagai sumber daya termasuk sumber-sumber daya teks, visual, suara, dan video. Makna literasi terus mengalami perubahan, seperti Varis (1997: 4) menyatakan, literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja, karena "teks" sudah diperluas maknanya sehingga mencakup juga "teks" dalam bentuk visual, audio-visual, dan dimensi-dimensi komputerisasi, sehingga di dalam "teks" tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif. Meski demikian, lebih lanjut Varis (1997) menyatakan, keterampilan membaca dan menulis merupakan dasar untuk melek-media. Artinya, apa yang dinamakan sebagai literasi baru atau

neoliterasi itu memerlukan dasar kemampuan membaca dan menulis. Kemudian, pengertian literasi baru dimaknai pula oleh Firestone sebagai kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk (Iriantara, 2009: 7).

Perkembangan konsep literasi sejalan dengan perkembangan media komunikasi sepanjang sejarah peradaban manusia. Oleh sebab itu penting untuk melihat kronologi perkembangan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan manusia. Kondisi tersebut melahirkan tantangan bagi seluruh masyarakat untuk hidup di dunia baru yang disebut dengan dunia sesak-media, serta dunia yang komunikasi antar manusianya semakin mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (Iriantara, 2009: 9).

Konsep baru literasi Bertelsmann & AOL Time-Warner (2002:13) dalam Iriantara (2009: 10) memasukkan komponen-komponen berikut ini untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis manusia dengan memadukan perkembangan sosial, professional, dan teknologi, yaitu:

a. Literasi teknologi: kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengomunikasikan informasi secara efektif.
b. Literasi informasi: kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi dan untuk membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut.
c. Kreativitas media: kapasitas individu yang terus berkembang dimanapun untuk membuat dan menyebarluaskan konten pada berbagai khalayak
d. Tanggung jawab dan kompetensi sosial: kompetensi untuk memperhit
e. ungkan akibat-akibat sosial dari publikasi on-line dan tanggung jawab terhadap anak-anak.

2. Elemen Penting Literasi Media

Ada beberapa poin yang mendasari pentingnya literasi media (Baran&Dennis, 2010: 418-419), antara lain:

a. Khalayak adalah aktif, tetapi mereka belum tentu sadar akan apa yang mereka lakukan dengan media.
b. Kebutuhan, kesempatan, dan pilihan khalayak didorong secara tidak alamiah oleh akses terhadap media dan konten media.
c. Konten media dapat secara implisit dan eksplisit memberikan tuntunan terhadap tindakan.
d. Orang-orang harus secara realistis mengukur bagaimana interaksi mereka dengan teks media dapat menentukan tujuan bahwa interaksi tersebut mendukung mereka di dalam lingkungan mereka.
e. Orang-orang memiliki tingkatan berbeda dalam pengolahan kognitif, dan hal ini dapat secara radikal mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan media dan apa yang bisa mereka dapatkan dari media.

Ahli komunikasi, Art Silverblatt (2001) dalam Baran (2011: 32-35) mengidentifikasi tujuh elemen literasi media, kemudian ditambahkan satu elemen oleh Stanley J.Baran sehingga menjadi delapan elemen literasi media,yakni:

a. Sebuah keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan anggota khalayak untuk mengembangkan penilaian independen tentang konten media.
b. Pemahaman tentang proses komunikasi massa.
c. Sebuah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat.
d. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media.
e. Memahami isi media sebagai teks yang memberikan wawasan kita tentang budaya dan hidup.
f. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi media.
g. Pengembangan keterampilan produksi yang efektif dan bertanggung jawab.
h. Pemahaman tentang kewajiban etika dan moral praktisi media.

3. Tujuan Literasi Media

Tujuan penyelenggaraan literasi media melalui pendidikan media di beberapa Negara di Asia, Amerika dan Eropa menunjukkan keragaman tujuan, di antaranya:

a. Mengembangkan otonomi/pemikiran kritis pribadi
b. Mengembangkan apresiasi, persepsi, dan pemahaman serta analisis teks media
c. Mempersiapkan orang untuk hidup dalam masyarakat demokratis
d. Mengembangkan kesadaran atas implikasi sosial, kultural, ekonomi dan politik teks-teks media (yang dikonstruksi lembaga-lembaga media)
e. Menyandi-balik (decode) teks/pesan media
f. Mengembangkan kemampuan komunikatif pribadi
g. Mengembangkan apresiasi dan persepsi estetis, pemahaman atas teks media, estimasi mutu estetis teks media
h. Mengajarkan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengalami berbagai teknik yang dipergunakan untuk menghasilkan teks/produk media
i. Mempelajari teori tentang media dan kultur media
j. Mempelajari sejarah media dan kultur media Sementara Hobbs (1998:2) sebagaimana dikutip oleh Iriantara (2009: 24) menunjukkan Tiga tujuan literasi media sebagai berikut:
   1) Penguatan akses terhadap informasi
   2) Mendukung dan menumbuhkembangkan lingkungan pendidikan
   3) Menginspirasikan untuk mengembangkan akses terhadap berbagai sumber informasi.

Sedangkan Mitchell (2002: 3) memandang literasi media bukan sekadar mengajarkan cara membaca atau cara menyaksikan acara televisi secara kritis melainkan pemberdayaan khalayak media massa. Oleh sebab itu, tujuan literasi media di antaranya

a. Membantu untuk secara kritis menyadari bagaimana media dan acara-acara yang berbeda disajikan televisi pada dasarnya menawarkan pandangan dunia yang berbeda satu sama lain.
b. Membantu kita untuk melihat bagaimana diri kita dan orang lain memanfaatkan televisi secara berbeda bergantung pada pengalaman hidup

Secara umum dapat dipahami bahwa orang yang melek media, secara individual pada akhirnya akan memiliki kemampuan pemikiran yang kritis terhadap media, dan terus mengembangkan kesadaran kritisnya atas media serta mengembangkan kemandirian yang kritis atas media, dan pada puncaknya akan mampu untuk memproduksi informasi untuk media atau bahkan membuat media sendiri. Orang yang bisa mengkritisi media kemudian berusaha membuat informasi yang cocok untuk media, dan informasi yang cocok untuk media, dan informasi tersebut mampu menyehatkan secara psikologis itu merupakan orang yang bisa disebut sebagai orang yang melek media. Sedangkan pada dimensi kreatif, orang yang melek media memandang media merupakan peluang baginya untuk melakukan ekspresi kreatif. Bentuk ekspresi itu bisa dengan menulis puisi atau cerita pendek. Selain itu, bisa juga dengan membuat tata letak yang artistik untuk media cetak atau memproduksi acara dengan sentuhan seni untuk radio dan televisi. Atau bisa juga dengan membuat konten menarik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang diunggah ke internet untuk menarik perhatian warganet.

Secara social politik, orang yang melek media akan menjadi warga Negara yang aktif dalam proses keputusan politik. Selanjutnya aktif pula dalam memberi masukan untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, pada tingkat sekolah akan terjadi perubahan relasi guru-murid dari guru pemberi informasi pengetahuan dan murid penerima pengetahuan menjadi sama-sama belajar pengetahuan melalui pertukaran informasi pengetahuan (Iriantara,2009: 25).

Selanjutnya, Gerhard Tulodzieki (1999) seperti yang dikutip Iriantara (2009: 38) memerinci kompetensi media yang menjadi tujuan literasi media yaitu:

a. Berkenaan dengan efek media, khususnya yang berkenaan dengan gangguan perasaan, konseptualisasi yang keliru dan orientasi perilaku yang problematis.
b. Menggunakan media dengan mempertimbangkan secara cermat pilihan-pilihan tindakan yang berbeda dengan merefleksikan pilihan atas tawaran media, dengan melakukan tindakan alternatif terhadap konsumsi media dan pengambilan keputusan secara tepat dalam hal adanya pertentangan dalam tawaran pilihan dari media massa.
c. Memproduksi secara aktif media yang bisa berupa media dokumenter, media sekolah atau publik, dan media kritis.
d. Menganalisis media dan mengkritik media sebagai analisis dan kritik atas produk-produk media, situasi resepsi dan institusi media, selain kondisi-kondisi sosial produksi media.

Kajian Schuldermann dalam Gundacker (1999: 246) yang dikutip Iriantara (2009: 38-39) tentang kompetensi media dapat dideduksi menjadi dimensi-dimensi berikut:

a. Mengenali, mengidentifikasi dan memengaruhi motif yang mendorong orang mengonsumsi media.
b. Mencermati secara kritis nilai-nilai, norma-norma, idola dan stereotipe yang melekat dalam pesan-pesan media massa.
c. Menganalisis kondisi spesifik produksi dan efek media massa.
d. Memahami kode-kode dan format-format spesifik media massa.

Kajian lebih lanjut Schulermann menunjukkan adanya upaya mengoperasionalkan kompetensi media yang dilakukan sejumlah pakar pendidikan media di Austria. Kompetensi tersebut mencakup

a. Kemampuan mengkritik media, dengan cara:
    1) Analitis, yakni memahami secara tepat problematika proses-proses sosial seperti proses-proses konsentrasi pemilikan media.

2) Refleksif, yakni kemampuan menerapkan pengetahuan analitis untuk diri dan tindakannya.
3) Etis, yakni dimensi-dimensi yang memadukan pemikiran analitis dan refleksi yang menunjukkan tanggung jawab sosial.

b. Pengetahuan media yang berkenaan dengan pengetahuan tentang media kontemporer dan sistem media:
1) Dimensi informatif yang berisikan bidang tradisional pengetahuan seperti apa sistem penyiaran dualistik, bagaimana wartawan bekerja, apa aliran media dan seterusnya.
2) Dimensi instrumental dan kualifikasi yang berkenaan dengan kualifikasi untuk bekerja dengan menggunakan teknologi baru.

c. Pemanfaatan media, yang harus dipelajari dalam hal:
1) Reseptif, kompetensi untuk menggunakan program-program yang berbeda.
2) Interaktif, berkomunikasi dengan layanan seperti telebanking.

d. Desain media, yang memiliki dua aspek, yaitu:
1) Inovatif yang berarti perubahan-perubahan dan perkembangan lebih lanjut sistem media di dalam logikanya sendiri.
2) Kreatif yang berarti memfokuskan pada estetika dan menembus batas-batas kebiasaan berkomunikasi.

B. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen sama tuanya dengan peradaban di Yunani kuno dan kerajaan Romawi, ditemukan berlimpah-limpah bukti dari manajemen dalam arsip sejarah pemerintahan, tentara dan pengadilan lain-lain. Manajemen berasal dari kata kerja to manage (bahasa inggris), yang artinya mengurus, mangatur, melaksanakan dan mengelola (Fahmi, 2012: 2)

Adapun definisi dari ilmu manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari komprehensif tentang bagaiman mengarahkan dan

mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa pendapat para ahli tentang definisi manajemen.

a. Manajemen merupakan suatu rangkaian aktvitas (perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan engendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi yaitu, Manusia, financial fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. (Ricky W. Griffin)
b. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (George R. Terry dan Leslie W. Rue).
c. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan penegendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (James A. F . stoner).
d. Menurut Zulkifli Amsyah Manajemen adalah proses kegiatan mengelola sumber daya manusia, materi, dan metode berdasarkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dapat dicapai secara efisiendan sfektif.
e. Menurut Luther Gllick Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan/ science yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaiman manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat suatu system kerjasama ini lebih manfaat bagi kemanusian. Luther Gullick juga memandang manajemen sebagai ilmu pengetahuan dan memandang unsur manusia sebagai unsure utama manajemen. Sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka komponen yang lain dapat digerakkan, diarahkan dan diatur (Lasan, 2009: 17)

f. Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blachard sebagai suatu usaha yang dilakukan dan dengan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Hersey dan blachard lebih menekankan bahwa definisi tersebut tidaklah dimaksudkan hanya untuk satu jenis organisasi saja, tetapi dapat terapkan pada berbagai jenis organisasi tempat individu dan kelompok tersebut menggabngkan diri untuk mewujudkan tujuan bersama.

g. John D. Millet membatasi manjemen adalah suatu proses pengarahan dan pemebrian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan, Millet lebih menekankan bahwa manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berutan (Siswanto, 2011: 1).

2. Unsur –unsur manajemen

a. Perencanaan(planning)

Aktifitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan kemudian. Setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktifitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktifitas untuk memilih dan menghubungkan fakta serta aktifitas membuat dan mengguunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktifitas yang direncanakan. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktifitas selanjutnya. Tujuan yang ingin direalisasikan tersebut harus tetap diperhatikan, dipedomani,dan dijadikan bacaan oleh setiap elemen organisasi. (Fahmi, 2012: 84).

Fungsi utama sebuah perencanaan adalah menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kegiatan, yaitu:

1. Memfokuskan tujuan.

   Perencanaan membuat tim atau panitia acara dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, karena berkonsentrasi pada prioritas dan alur kerja yang jelas.

2. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang.

   Perencanaan membuat panitia acara melihat semua komponen secara menyeluruh. Ini akan membuat panitia acara tidak berpikir mengenai efek kegiatan dalam jangka waktu yang pendek tapi juga kemasa depan, hingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi kebutuhkan masa depan.

3. Meminimalisasi kegagalan.

   Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan spesifik serta lengkap dengan langkah-langkah alternatif, sehingga bila ada kegagalan bisa langsung ambil alternatif penyelesaian.

Semua keuntungan tersebut tidak akan didapatkan jika perencanaan kegiatan dilakukan sebatas angan-angan. Karenanya, perencanaan harus dibuat dengan matang dan dituangkan secara tertulis atau terdokumentasikan dengan jelas.

Syarat-syarat perencanaan baik, yaitu:

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan sejelas-jelasnya.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternatif dan *premises*-nya.
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.

Jika perencanaan dilakukan dengan baik akan dihasilkan suatu rencana yang baik.

Setiap perencanaan pasti mengharuskan adanya jangka waktu,

untuk itu rencana harus dikaitkan dengan kondisi yang direncanakan itu. Beberapa rencana jangka waktu adalah sebagai berikut:

1.Rencana jangka panjang (*long term planning*), waktunya lebih dari lima tahun.

2.Rencana jangka menengah (*middle term planning*), waktunya antara 2 sampai dengan 5 tahun.

3.Rencana jangka pendek (*short term planning*), waktunya antara 1 sampai 2 tahun.

Ketiga pembagian jangka waktu ini sangat berkaitan dan saling mendunkung. Kaitan rencana harus diperhatikan, artinya rencana jangka pendek harus terintegrasi dengan rencana jangka menengah, rencana jangka menengah harus terintegrasi dengan rencana jangka panjang.

Tujuan mengadakan pembagian waktu rencana ini adalah untuk menetapkan langkah-langkah dan tindakan tindakan yng harus dilaksanakan dalam waktu tertentu serta target yang harus dicapai pada waktu tertentu.

Sedangkan pada prinsipnya, rencana tindakan kinerja seperti yang dikemukakan Payaman J.Simanjuntak adalah sebagai berikut:

1.Tindakan dan tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran.

2.Produk dan jumlah yang akan dihasilkan.

3.Sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut.

4. Resiko yang mungkin dihadapi.

5. Rencana tindakan darurat (*contingency*) bila timbul masalah.

Kemudian Louis A. Allen mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan, yaitu:

1) *Forecasting* (Peramalan)

Perencanaan harus dapat meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang tentang keadaan, perkembangan situasi, kemajuan teknik, kebijaksanaan pemerintah, dan lain

sebagainya. Ramalan-ramalan itu disusun secara sistematis dan berkesinambungan serta berusaha mendahulukan kondisi-kondisi pada waktu yang akan datang itu.

2) *Establishing Objectives* (penetapan tujuan)

Dalam rangka meramal ini manajer harus menentukan dengan tegas hasil akhir yang diinginkan. Menetapkan tujuan ini merupakan tugas dari perencana (*planner*). Tujuan harus dikembangkan untuk menentukan semua kegiatan yang akan dilakukan.

3) *Programming* (pemrograman)

Perencanaan harus menetapkan prosedur kegiatan-kegiatan dan biaya- biaya yang diperlukan untuk setiap kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

4) *Scheduling* (Penjadwalan)

Manajer atau pimpinan harus dapat menentukan waktu yang tepat, karena ini merupakan suatau ciri yang penting dari suatu tindakan yang baik. Manajer atau pimpinan menentukan waktu dari kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan jadwal, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap aktivitas dikerjakan.

5) *Budgeting* (penganggaran)

Penyusunan anggaran belanja harus dilakukan oleh perencana dalam mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada serta penetapan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam hal ini ditentukan alat-alat, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan acara-acara secara efektif dan efisien. *Budgeting* ini juga dapat merupakan alat pengendalian dalam keuangan.

6) *Developing procedure* (pengembangan prosedur)

Untuk penghematan, efektifitas dan keseragaman

diusahakan sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan-pekerjaan tertentu harus dilakukan dengan cara yang tepat sama dimanapun pekerjaan itu diselenggarakan.

7) *Establishing and interpreting policies* (penetapan dan penafsiran kebijaksanaan).

Untuk menjalin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok, seorang menetapkan, menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Suatu kebijaksanaan adalah keputusan yang senantiasa berlaku untuk masalah-masalah yang timbul berulang-ulang dalam perusahaan.(Malayu, 2009: 113-114).

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian sebagai fungsi yang kedua adalah organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis. Organisasi dalam arti statis adalah skema, bentuk, bagan yang menujukan hubungan diantara fungsi serta otoritas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari individu yang diberi tugas atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan untuk pengoprasiannya. Dengan demikian, kewajiban yang dijalankan memberikan saluran yang efektif bagi setiap aktifitas yang dilaksanakan.

c. Pengarahan/pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwudnya fisi misi oraganisasi. Untuk memahami lebih dalam pengertian dari pengawasan ada baiknya kita lihat pendapat para ahli:

i. G. R. Terry “ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan,aa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang

dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

ii. Hadibroto mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi kegiatan dengan tujuan agar organisasi kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan.

iii. T. Hani Handoko' pengawsan dapat didefinisikan sebagi proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan oraganisasi dan manajemen tercapai.

iv. Brantas' pengawasan adalah proses pemantauan penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan koerktif guna penyempurnaan lebih lanjut. (Fahmi, 2012: 84)

d. Evaluasi

Dalam suatu organisasi sangat diharapkan agar pelaksanaan pekerjaan agar berdasarkan pada konsep rencana dan tidak tertutup kemungkinan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja. Evaluasi bertujuan untuk melihat lebih dalam dan detil tentang bagaimana kinerja itu berjalan apakah sesuai atau tercapaikah rencana tersebut atau kemungkinan ada yang perlu perubahan, atau hanya akan dipertahankan. Beberapa tujuan dilakukannya evaluasi:

1) Menghindari kesalahan yang lebih besar. Dimana kesalahan yang lebih besar tersebut dapat merugikan perusahaan baik segi waktu dan biaya.
2) Keseluruhan pihak dalam organisasi baik manajer dan karyawan dapat mengetahi berbagai bentuk yang ada selama ini tidak diketahui. Sehingga kesempatan itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.
3) Hasil evaluasi dapat dijadikan catatan dan selanjutnya bisa di dokumentasikan sebagai ebuah laporan untuk disampaikan pada

bagian *research and development* untuk selanjutnya di tindaklanjutan dalam bentuk pengkajian secara jauh lebih komprehensif.

4) Untuk mengetahui dengan baik aakah beaban kerja yang diberikan selama ini telah dapat diterima oleh para karyawan atau tidak. Barangkali beabn kerja yang diberikan selama ini adalah sebenarnya sangat berat atau tidak sesuai, sehingga harus dicarikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
5) Dengan adanya evaluasi maka diahrapkan dapat dijadiakn sebagi media untuk leih mendekatkan atau mengakrabkan ihak manajer dengan karyawan perusahaan. (Fahmi, 2012: 26)

BAB III

LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah

1. Sejarah berdiri

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan disetiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen. Dengan independensinya ini, diharapkan semangat dari Undang-undang 32 Tahun 2002 ini membawa nafas berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Pada Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 disebutkan bahwa “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Tuntutan di era demokratisasi saat ini, menempatkan publik sebagai pengendali utama ranah penyiaran.

Mengingat frekuensi adalah milik publik dan jumlahnya terbatas maka peran penting media penyiaran dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial bagi masyarakat, harus dapat memanfaatkan frekuensi bagi kepentingan publik. Dasar fungsi pelayanan informasi yang sehat semacam inilah yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002: Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI.

Pengesahan atas Undang-undang no. 32 Tahun 2002 memang telah mengubah secara fundamental pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia karena telah meletakkan dan melindungi hak masyarakat dengan semestinya. Perubahan paling mendasar dalam UU ini adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Artinya bahwa pengelolaan sistem penyiaran, yang merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Kebijakan masa lalu (rezim Orde Baru) memberikan pelajaran yang harus ditinggalkan; Kebijakan yang menempatkan pengelolaan sistem penyiaran di tangan pemerintah sehingga menjadikan sistem penyiaran sebagai alat strategis yang mudah dikooptasi negara dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Akibat lain yang muncul saat itu adalah terjadinya kolusi dalam sistem penyiaran dari kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, UU 32/2002 mengatur palaksanaan penyiaran dengan sistem siaran berjaringan. Sistem ini mewajibkan setiap lembaga penyiaran yang ingin

menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, sentralisasi dan monopoli informasi diharapkan tidak lagi terjadi.

Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini, sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak-hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperolah informasi yang sesuai dengan kebutuhan polik, sosial, dan budayanya. Di samping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

Posisi KPI berdasarkan pasal 7 UU 32 / 2002 adalah : 1) KPI Pusat berkedudukan di tingkat Pusat (Jakarta), dan 2) KPI Daerah berkedudukan di tingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat berjumlah sembilan orang, sedangkan KPI Daerah berjumlah tujuh orang.

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 9 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya KPID dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh APBD. KPID juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kapasitas wawasan pengetahuan dan keilmuan yang diperlukan dan dipandang sesuai dengan bidang penyiaran. Pembentukan struktur organisasi KPID pada dasarnya dilakukan semata-mata dengan mengacu secara konsisten pada rincian tugas dan kewajiban, fungsi serta wewenang KPID sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang.

Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-3 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/230/2010 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013 yang

ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2010 dan dilantik pada 13 Januari 2011.

Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-4 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/10 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2014 – 2017 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 3 Februari 2014.

Keanggotaan KPID Jawa Tengah periode ke-5 dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.487.23/4 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2017 – 2020 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Februari 2017. (https://kpid.jatengprov.go.id/profil-kpid/ 09-05-2018, 11.00 WIB)

2. Visi dan Misi

Visi :

"Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Sehat, Adil Dan Bermartabat"

Misi :

a. Mengembangkan Media Penyiaran yang sehat, terpercaya dan bermanfaat.
b. Mendorong masyarakat memiliki daya kritis terhadap isi siaran Radio dan Televisi.
c. Mengatur dan mengawasi media penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Gambar 3.1 struktur Organisasi KPID Jawa Tengah
(Data KPID Jawa Tengah)

Ketua	:	BUDI SETYO PURNOMO S.Sos, M.I.Kom
Wakil Ketua	:	ASEP CUWANTORO, S.Pd.I, M.Pd
Bidang Perizinan	:	1. SETIAWAN HENDRA KELANA, S.Kom
		2. ASEP CUWANTORO, S.Pd.I, M.Pd
Bidang Kelembagaan	:	1. MUHAMMAD ROFIUDIN, M.I.Kom
		2. DINI INAYATI, S.T.
Bidang Isi Siaran	:	1. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.KM
		2. SONAKHA YUDA LAKSONO, S.E

Tenaga Ahli

a. Tenaga ahli adalah tim pengkaji isi siaran yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan, bertugas melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran hasil pemantauan isi siaran dan aduan masyarakat.
b. Dibentuk untuk membantu komisioner dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait proses penindakan pelanggaran isi siaran.

c. Rekomendasi Tenaga Ahli yang dihasilkan dalam kajian isi siaran, dirapatkan kembali oleh komisoner KPID untuk diambil keputusan final terkait penindakan.

Data Kepegawaian KPID Provinsi Jawa Tengah

a. Jumlah Komisioner 7 orang
b. Jumlah Pegawai 6 orang

Non PNS 28 orang

Tenaga Pemantau

a. Televisi
    1) Beny Binarto
    2) Zainal Arifin Salam
    3) Fakhrudin Nuryanto
    4) Siti Isrokah
    5) Agung Wirantomo
    6) Vidya Kharisma
    7) Febriyan Adi Nugroho
    8) Denya KSARiana Surya Kusuma
b. Radio
    1) Marisa
    2) Yosza Nurmalita

Tenaga Ahli Isi Siaran

a. Pudjo Rahayu, M.Si
   (Tokoh Penyiaran Jawa Tengah)
b. M. Rikza Chamami, M.S.I
   (Akademisi UIN Walisongo)

Kelompok Masyarakat Pemantau

1. Peserta pembentukan Kelompok Masyarakat Pemantau terdiri dari 16 orang.
2. Anggota kelompok berasal dari sejumlah organisasi seperti:
    a. Dishubkominfo
    b. PGRI

c. IGTKI
d. TP-PKK
e. Muslimat NU
f. Fatayat NU
g. Aisyiah
h. LSM pemerhati penyiaran

KPID Jawa Tengah mengambil 4 organisasi di antara beberapa organisasi di atas, sesuai dengan kesiapan organisasi tersebut di tiap daerah.

4. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur

1) 1 ruang ketua dan wakil ketua
2) 5 ruang komisioner
3) 1 ruang lobi tamu
4) 1 ruang kepala sekretariat
5) 1 ruang resepsionis
6) 4 ruang subbag (Umum, Izin,Binwas, Kelembagaan)
7) 1 ruang pemantauan siaran
8) 1 ruang sidang tenaga ahli
9) 1 ruang dharma wanita
10) 1 ruang rapat
11) 1 ruang mushola
12) 1 ruang dapur
13) 1 ruang gudang

5. Tugas dan Kewajiban KPI dan KPID

Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memliki tugas, kewajiban dan wewenang yang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan, yakni 1) regulasi atau pengaturan, 2) pengawasan dan pengembangan.

Lebih rinci mengenai tupoksi dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
c. Ikut membangun iklim yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8).

Tugas dan kewajiban KPI.Sesuai Peraturan KPI No 1 Tahun 2009

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM.
b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.
d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
e. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
f. Menyusun perencanaan dan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Kesekretariantan Pasal 23 Per KPI No.1/ 2009

a. Sekretariat KPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
b. Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perancangan peraturan dan administrasi pengaduan;

c. Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran;
d. Pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi monitoring siaran; dan
e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi dan kepustakaan.

Wewenang

a. Menetapkan standar program siaran,
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program siaran.
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

6. Kelembagaan KPI dan KPID

Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.

Peran media massa, idealismenya adalah untuk memberikan informasi dan sebagai media jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat. Dengan jalinan komunikasi dan saling berinformasi secara dinamis masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa.

Namun praktisnya informasi itu merupakan komoditas yang bernilai ekonomis dan karena itu dikembangkan menjadi teknologi informasi pada sisi lain, media massa hendaknya juga tidak menyampaikan sajian yang sifatnya membuka issu baru yang sensitif di masyarakat. KPI merupakan

lembaga yang berkewajiban secara konsisten dalam hal ini. Dengan kewajiban demikian masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak saja menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup sehari-hari tetapi juga mampu memberi alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

Kinerja KPI yang sifatnya kontroversial saat ini adalah dalam bidang perizinan Carut marut pengaturan sistem penyiaran di tanah air yang diharapkan berakhir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ternyata belum berakhir, bahkan dengan keluarnya 4 Peraturan Pemerintah bukan menjernihkan iklim penyiaran tetapi menambah ruwet pengaturan sistem penyiaran. Didalam hal sistem penyiaran, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah (Wahid, 2006: 4-6).

Kekhususan yang diberikan oleh Undang-Undang ini mengingat kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan (DPR dan DPRD). Keanggotaannya tidak partisan dan tidak ada kepentingan dengan operasionalisasi penyiaran, semisal punya lembaga penyiaran. Kalau beberapa lembaga yang bergiat di penyiaran berteriak keras atas keluarnya PP itu, bukan berarti mereka bebicara asal beda dan tidak sekedar menurut trend protes terhadap sesuatu yang baru. Substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang seharusnya dipahami benar oleh pembuat

Peraturan Pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kewibawaan sebuah peraturan, disamping segera menuntaskan sebuah sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan aturan yang justru tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Dapat dipahami, kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini secara praktis adalah munculnya "korban", yaitu sistem penyiaran yang masih carut-marut dan serba tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas kepastian hukum dan ketataan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. Mekanisme perizinan yang sudah mulai tertata harus mentah kembali menuruti Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan diatas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-undang tentang Penyiaran adalah: mekanisme perizinan, pelakasanaan, pengawaasan dan penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poli-interpretasi.

Adanya tafsir terhadap istilah Negara di dalam penyempurnaan Undang-Undang harus ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah KPI. Legal reasoning-nya dengan mencermati keberadaan KPI sejak pembentukan sampai kepada mekanisme kinerja yang notabene merupakan representasi publik. Setidaknya yang dimaksudkan Negara bukanlah pemerintah karena asas Hukum Tata Negara di manapun mengajarkan pemerintah adalah eksekutif yang merupakan pelaksana dari Hukum Administrasi.

Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia:

a. Perizinan penyiaran;
b. Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
c. Pengaturan infrastruktur penyiaran; dan pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Bidang Pengawasan Isi Penyiaran

a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
b. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
d. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran;

Bidang Kelembagaan

a. Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga KPI;
b. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
c. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

B. Perencanaan Kegiatan Literasi Media

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi melahirkan media komunikasi yang bersifat massal, salah satunya media elektronik (radio dan televisi). Karakter media ini selain luas jangkauannya, juga cepat penyebarannya. Kecepatan dan luasnya penyebaran pesan yang disampaikan televisi mampu mempengaruhi pola hidup dan membuat perubahan di dalam masyarakat. Pesan atau isi siaran menjadi acuan, sehingga individu dalam masyarakat terdorong untuk mengadopsi isi siaran.

Salah satu target segmentasi khalayak yang perlu mendapatkan penanganan khusus tentang dampak isi siaran adalah remaja. Usia ini adalah kelompok yang paling mudah terpengaruh dan gampang menyerap sesuatu yang baru yang kadang tanpa melalui proses filterisasi. Rasa ingin tahu yang besar mengakibatkan mereka rawan terpengaruh hal-hal negatif yang disajikan melalui isi tayangan/siaran. Dampak media penyiaran tak hanya

memancing rasa ingin tahu remaja, tetapi juga mendorong mengadopsi kebiasaan-kebiasaan tidak sehat yang kerap dimunculkan.

Secara psikologis remaja sedang mencari identitas dirinya dengan mencoba segala sesuatu yang baru, berusaha tampil beda, bergejolak, dinamis, kreatif, dan kadang-kadang agresif. Informasi yang tidak tepat dari televisi ditambah pengetahuan yang minim akan menimbulkan keinginan untuk mencoba, sehingga menjurus pada perilaku yang dapat mencelakai diri sendiri bahkan orang lain. Gejala seperti ini sudah mulai masuk ke dalam kehidupan remaja tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sampai ke pelosok pedalaman.

1. Realisasi Target dan Sasaran

   Kegiatan Literasi Media mampu menciptakan masyarakat yang melek media di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada umumnya, dengan sararan khusus yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, serta organisasi sosial dan masyarakat.

2. Hambatan

   Salah satu hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Media adalah berkaitan dengan belum adanya materi standar tentang literasi. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kerancuan dalam penyampaian materi, misalnya tentang internet, media cetak, film, dan sebagainya.

3. Rekomendasi

   Melihat tingginya animo peserta, kegiatan Literasi Media perlu dilaksanakan dengan lebih intensif. Target dan sasaran dan metode kegiatan perlu dilakukan lebih spesifik, misalnya dengan melibatkan guru dengan metode *Training of Trainer* (ToT).

C. Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi melahirkan media komunikasi yang bersifat massal, salah satunya media elektronik (radio dan televisi). Karakter media ini selain luas jangkauannya, juga cepat penyebarannya. Kecepatan dan luasnya penyebaran pesan yang disampaikan

televisi mampu mempengaruhi pola hidup dan membuat perubahan di dalam masyarakat. Pesan atau isi siaran menjadi acuan, sehingga individu dalam masyarakat terdorong untuk mengadopsi isi siaran.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (pasal 8 ayat (3) butir a) dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI memberikan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan (pasal 48 ayat (4) butir e). KPI wajib melindungi remaja dari pengaruh isi siaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah memandang penting dan bermaksud menyelenggarakan kegiatan literasi media demi menciptakan penyiaran yang lebih menyehatkan dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat dan agar tidak menyimpang dari perundangan yang berlaku.

1. Tujuan kegiatan literasi media di masyarakat adalah:
   a. Membangun kesadaran khalayak tentang cara media dikonstruksi dan diakses.
   b. Meningkatkan kemampuan khalayak untuk memahami, menganalisis, dan mendekontruksi pencitraan media.
   c. Membentuk agen literasi media.
2. Target dan Sasaran

   Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang melek media di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Secara khusus, sasaran utama kegiatan ini adalah para pelajar dan mahasiswa yang masih duduk di bangku SMU dan perguruan tinggi, organisasi sosial/massa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat.

3. Pelaksanaan

Sebelum diadakannya literasi media, ada beberapa temuan yang menjadi rujukan KPID sebagai penyelenggara untuk memperkuat kegiatan literasi media. Hal tersebut bisa merupakan keluhan penyiaran atau contoh kasus penyiaran yang buruk.

Tahun 2018, literasi media dilaksanakan sebanyak tujuh (7) kali, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kota Pekalongan

1) Waktu Pelaksanaan

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2018

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Gedung C Lantai 3 Universitas Pekalongan. Jalan Sriwijaya No. 3, Bendan Pekalongan.

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekalongan adalah para mahasiswa yang berasal dari Kota Pekalongan, antara lain dari Universitas Pekalongan (Fakultas Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kesehatan), STIKES Muhammadiyah Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan, serta Sekolah Tinggi Farmasi Pekalongan.

3) Narasumber

a) Dr. Nurul Huda S.H, M.Hum (Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pekalongan) dengan materi "*Potensi Undang-Undang Penyiaran untuk Menciptakan Dinamika Penyiaran yang Sehat*",

b) Asep Cuwantoro M.Pd (Wakil Ketua KPID Jawa Tengah)

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Pekalongan adalah Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Pekalongan.

5) Anggaran

Anggaran kegitan Literasi di Kota Pekalongan adalah sebesar Rp.12.293.000,-

b. Kabupaten Pati

1) Waktu Pelaksanaan

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Maret 2018

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Institute of Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Jl. Raya Pati-Tayu KM.20, Purworejo Margoyoso, Kabupaten Pati.

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Pati adalah para mahasiswa *Institute of Pesantren Mathali'ul Falah* (IPMAFA) Pati.

3) Narasumber

a) Drs. Ali Mansyur H.D. (Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah) dengan materi "*Cerdas Bermedia*"

b) Asep Cuwantoro M.Pd (Wakil Ketua KPID Jawa Tengah)

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kabupaten Pati adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan *Institute of Pesantren Mathali'ul Falah* (IPMAFA) Pati.

5) Anggaran

Anggaran kegitan Literasi di kabupaten Pati adalah Rp 11.503.000,-

c. Kota Semarang

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Maret 2018

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Gedung BLK Kota Semarang Jl. Majapahit 118, Kota Semarang

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah anggota Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.

3) Narasumber

1) Nur Syamsudin (*Ketua PC. IKA PMII Kota Semarang*) dengan materi "Menjadi Generasi Cerdas".
2) Muhammad Rofiuddin (Komisioner KPID Jawa Tengah)

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.

5) Anggaran

Anggaran kegitan Literasi di Kota Semarang adalah Rp 6.303.000,-

d. Kota Semarang

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 April 2018

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula 2 Auditorium UIN Walisongo Jl. Walisongo No. 3-5, Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

3) Narasumber

a) Ibnu Thalhah (Akademisi) dengan tema ”Literasi Media”.

b) Budi Setyo Purnomo (Ketua KPID Jateng).

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang.

5) Anggaran

Anggaran Pelaksanaan Rp 6.303.000,-

e. Kota Semarang

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 April 2018

Waktu : 19.00 WIB – Selesai

Tempat : Majesty Convention Hall Jl. Gajah Mada No. 74 – 76 Kota Semarang

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah anggota Bantuan Komunikasi Polrestabes Kota Semarang.

3) Narasumber

a) Mayong Suryo Laksono (KPI Pusat) Tema" Masyarakat Cerdas dan Kritis Terhadap Media Televisi".

b) Budi Setyo Purnomo (Ketua KPID Jateng)

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Bantuan Komunikasi Polrestabes Kota Semarang.

5) Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan Literasi Media di Kota Semarang adalah Rp 6.759.627,00.

f. Kota Salatiga

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Salatiga diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 April 2018

Waktu : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Kedai Kaisar Jalan Dipomenggolo, Pulutan, Sidorejo Kota Salatiga

2) Peserta

Peserta Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Salatiga adalah para mahasiswa yang berasal dari Kota Salatiga.

3) Narasumber

a) Abrori, M.S.I (Akademisi IAIN Salatiga)

b) M. Rofiuddin (Komisioner KPID Jateng)

4) Panitia Penyelenggara

Panitia Penyelenggara Kegiatan Literasi Media Dikalangan pelajar dan Mahasiswa di Kota Salatiga adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Negeri (UIN) Salatiga.

5) Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan Literasi Media di Kota Salatiga adalah Rp 10.515.373,00.

g. Kabupaten Banyumas

1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Literasi Media Dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kab. Banyumas diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Penyiaran Nasional, dan diselenggarakan pada:

Hari : Minggu
Tanggal : 6 Mei 2018
Waktu : 06.00 WIB – Selesai
Tempat : RRI Purwokerto Jl. Jend Sudirman 427 Purwokerto Banyumas

2) Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan Literasi Media di Kab. Banyumas adalah Rp 8.500.000,00.

Kasus pelanggaran dalam hal penyiaran di televisi lebih banyak ketimbang kasus pelanggaran di radio. Pelanggaran yang dilakukan pun beragam, misalnya kekerasan verbal seperti kata-kata yang tidak pantas, adegan yang tidak sesuai dengan jam tayang sehat, dan lain- lain. Hal demikian cukup berpengaruh kepada tindak kekerasan di masyarakat.

Dalam program literasi media kepada masyarakat KPID mengundang beberapa instansi pemerintahan seperti humas pemerintahan daerah, organisasi masyarakat, perwakilan PGRI, MUI, HMI, PMII, Karang Taruna dan lain-lain. Lalu mengundang civitas akademika dari beberapa kampus yaitu perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, lalu juga mengundang tokoh

masyarakat yang berpengaruh misalnya sepuh, ulama, atau tokoh berpengaruh lainnya. Dengan demikian KPID menerapkan pola *two-step low of communication* dimana kegiatan yang dilakukan membutuhkan *opinion leader* sebagai penyambung informasi diharapkan bisa menyalurkan kepada anggota atau bawahannya.

Perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang khalayak akan membimbing panitia kegiatan dalam merancang "pesan apa", "untuk siapa", disampaikan "lewat media apa" dan "siapa yang cocok untuk menyampaikannya". McQuail & Windahl mendefinisikan khalayak sebagai sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan sosialisasi. Namun besarnya jumlah khalayak ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki karakteristik yang beragam. Akibatnya cara mereka merespons pesan-pesan kegiatan literasi media juga akan berbeda.

Bicara mengenai kegiatan, pasti bicara soal *budgeting* atau penganggaran dana. Direncanakan oleh KPID bahwa anggaran dana yang dipakai untuk kegiatan adalah berasal dari APBD. Jadi sebenarnya program kegiatan ini sangat bergantung kepada anggaran yang akan dipakai. Sebisa mungkin dimanfaatkan ketika anggaran program kegiatan literasi media ini turun dan digunakan.

Namun demikian KPID juga harus memilah siapa yang harus menerima kegiatan literasi media ini. Jika tujuan utamanya adalah untuk menjadikan masyarakat melek media, berarti harus dihadirkan pula pemahaman mengenai bagaimana dan seperti apa melek media itu. Yaitu memilih khalayak yang tepat dan benar berpengaruh untuk meneruskan pesan kampanye itu tidak hanya untuk keluarga pribadinya namun juga untuk masyarakat luas.

Kemudian kegiatan yang selanjutnya dilakukan dalam fungsi perencanaan menurut Louis A. Allen adalah penjadwalan (*scheduling*) yaitu penentuan waktu yang tepat melalui penyusunan jadwal kegiatan, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap aktivitas yang dikerjakan. Dengan

penyusunan jadwal kegiatan ini akan memudahkan pelaksanaannya. Asep Cuswantoro mengatakan bahwa dalam menentukan jadwal pelaksanaannya dilakukan dengan pembicaraan dengan para komisioner KPID secara tertutup.

BAB IV

ANALISIS LITERASI MEDIA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH

A. Perencanaan Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Media khususnya televisi memiliki pengaruh besar. Secara teori bisa mempengaruhi manusia di tingkat kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan behavioral (perilaku). Ketua KPID Jawa Tengah saat sosialisasi literasi media menyampaikan bahwa fokus literasi media adalah kepada media televisi, karena media televisi jauh lebih berbahaya ketimbang radio.

Kita bisa melihat bahaya sebuah media bukan hanya dari gambar yang ditampilkan, penggunaan bahasa, gerak tubuh, warna dari gambar sekalipun bisa berbahaya untuk penonton. Misalnya adalah alasan mengapa bayi sangat dilarang untuk melihat tayangan televisi dikarenakan mata bayi itu masih sensitif. Seorang ibu yang membiarkan bayinya menonton sebenarnya kebanyakan tidak mengerti bahwa perubahan bentuk, warna, suara tulisan dan apa pun yang ditayangkan televisi akan mempengaruhi mata banyi karena mata bayi masih sangat sensitif.

Apalagi anak-anak yang belum begitu mengerti dengan media. Mereka cenderung menjiplak atau meniru apa yang mereka lihat dan rasakan. Seperti misalnya anak meniru gaya berlari kartun Naruto, atau melihat iklan masuk kulkas, atau juga seperti kasus yang baru saja diberitakan bahwa anak sengaja meniru gantung diri dan akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Itu semua menjadikan kegiatan Literasi Media ini penting untuk segera dilaksanakan.

Sebelum diadakannya literasi media, ada beberapa temuan yang menjadi rujukan KPID sebagai penyelenggara untuk memperkuat kegiatan literasi media. Hal tersebut bisa merupakan keluhan penyiaran atau contoh kasus penyiaran yang buruk.Menurut William R. Sweeney, *a campaign without a plan is like a journey without a map*. kampanye seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik lain. Untuk sampai pada

titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat. Di sini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan. Perencanan lanjut Sweeney.

Sebelum diadakannya kegiatan pasti ada sebuah perencanaan terlebih dahulu unuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya KPID Jawa Tengah juga mengadakan perencanaan dalam setiap kegiatan, perencanaan kegiatan biasanya di bahas dalam rapat pleno. Dalam rapat pleno membahas agenda-agenda terdekat, pembagian tugas, bidang apa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Tegasnya Rofi.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi: persiapan panitia, konsepan yang matang, dari mulai pembicara atau narasumber, moderator, metode penyampaian materi. Secara teoritis hal-hal tersebut akan bisa menjadi pegangan dan pedoman untuk penyelenggara acara. KPID bisa menggunakannya untuk kegiatan sosialisasi yang mungkin serupa di kegiatan selanjutnya. Lalu hasil dari dokumentasi kegiatan, baik dari foto kegiatan, antusiasme audiens, jadwal pelaksanaan, atau temuan data baru dilapangan akan membuat kegiatan tersebut bisa diukur seberapa efektif kegiatan literasi media tersebut.

B. Pelaksanan Kegiatan Literasi Media Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah

Nedra K. Weinrich, seorang pakar kampanye kegiatan perubahan sosial dari Harvard University mengungkapkan *a well-planned implementation increases the probability of reaching the right people nad having the desire effect.* (Pelaksanaan program yang didasarkan pada perencanaan yang baik sebenarnya bukan hanya memungkinkan mencapai orang-orang yang tepat atau tujuan yang diharapkan, tapi lebih dari itu membuat sebuah tindakan yang dilakukan lebih sistematis, terarah dan antisipatif).(Venus, 2004: 199)

Pelaksanaan kegiatan adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sifatnya yang demikian maka proses pelaksanaan harus secara konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa mengabaikan penyesuaian yang perlu dilakukan

sesuai dengan kenyataan lapangan yang dihadapi. (Venus, 2004: 200)

Beberapa kasus pelanggaran dalam hal penyiaran di televisi lebih banyak ketimbang kasus pelanggaran di radio. Pelanggaran yang dilakukan pun beragam, misalnya kekerasan verbal seperti kata-kata yang tidak pantas, adegan yang tidak sesuai dengan jam tayang sehat, dan lain- lain. Hal demikian cukup berpengaruh kepada tindak kekerasan di masyarakatJam tayang yang sehat adalah jam tayang yang proporsional dan disesuaikan dengan pengkategorian atau pengklasifikasian yang dibuat oleh KPI berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tentang penyiaran. Pengkategorian tersebut digunakan untuk memberi peringatan kepada pemirsa dengan menggunakan simbol. Simbol berhuruf P yang berarti pra dengan batasan usia 2-6 tahun, A yang berarti anak dengan batasan usia 7- 15 tahun, R yang berarti remaja dengan batasan usia 13-17 tahun dan lainnya.

Namun sampai saat sekarang program tayang di televisi belum juga peduli untuk menampilkan simbol dengan jelas. Beberapa lembaga penyiaran hanya menyertakan simbol dengan mode transparan, bentuknya tidak besar dan di letakkan di sudut kiri bawah. Simbol yang dipakai adalah simbol yang dibuat oleh lembaga penyiaran dan tidak menggunakan simbol yang dibuat oleh KPI.

KPID Jawa Tengah dalam tahun ini hanya dapat melakukan kegiatan literasi media 10 kali dalam setahun, yang biasanya hingga 20 kali dalam setahun hal ini disebabkan karena turunnya anggaran untuk KPID, meskipun dengan anggaran yang minim KPID tetap akan melaukan hal yang terbaik untuk masyarakat luas guna terciptanya masyarakat yang cerdas dalam bermedia. Semester ini KPID sudah melaksanakan kegiatan literasi media ke masyarakat sebanyak 5 kali.

Kegiatan yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam bermedia itu tidak hanya melibatkan komisioner KPID Jawa Tengah sebagai narasumber, akan tetapi KPID juga sering melibatkan orang luar sebagai narasumber, misalnya dari aktivis yang memantau media atau juga dari pihak jurnalis, bahkan pernah sekali melibatkan dalang sebagai narasumber materi

literasi media.

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini sangatlah antusias dengan materi yang dibawakan oleh para komisioner KPID Jawa Tengah, dengan metode pembawaan materi yang lebih mengena kepada masyarakat atau peserta sehingga dapat mencairkan suasana, bahkan tidak sedikit dari mereka yang meminta agar tempat mereka didatangi lagi dengan materi-materi yang lainnya.(wawancara dengan Rofiuddin)

Proses pelaksanaan seperti apa? KPID Jawa Tengah mempunyai dua golongan atau kategori, yaitu yang pertama sesuai dengan program kerja tiap-tiap bagian di KPID Jawa Tengah. Program yang sudah direncanakan atau sudah disusun sedemikian rupa, dari mulai tempat sasaran kegiatan literasi media sampai ke hal kecil yang berkaitan dengan kegiatan literasi media, itu semua sudah tersusun rapi. Kedua dari masyarakat sendiri yang sadar akan pentingnya pemahaman mengenai media sehingga meminta agar pihaknya dari KPID dapat menyalurkan ilmunya mengenai media khususnya literasi media. Kesadaran masyarakat yang menginginkan diadakannya kegiatan literasi media ditempatnya, KPID tetap akan memfasilitasinya dari mulai pembicara atau moderator hingga logistik yang dibutuhkan dalam kegiatan itu, akan tetapi untuk urusan tempat pihak pemohon yang menentukan atau menyediakan tempatnya. Metode penyampaian materi dalam kegiatan ini tidak melulu dengan diskusi yang tergolong membosankan, tetapi KPID Jawa Tengah lebih cerdas dalam mengemas penyampaian materi literasi media, yaitu dengan metode ceramah interaktif, kadang kala juga menggunkan wayang sebagai metodenya, bahkan melibatkan para seniman muda untuk ikut serta mensosialisasikan literasi media melalui karyanya.

Masyarakat lebih cerdas dalam bermedia, ikut berperan aktif dalam dunia penyiaran dan lebih kritisi terhadap tayangan-tayangan yang mereka konsumsi. Seperti itu harapan dan tujuan KPID mengadakan kegiatan literasi media di berbagai daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan Literasi Media yang diadakan oleh KPID

Jawa Tengah dapat dijadikan acuan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi, khususnya bagian literasi media, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut para peserta sangatlah antusias, antusias peserta ditunjukkan dengan sikap peserta yang meminta ada tindak lanjut dari KPID dan meminta agar KPID kembali lagi di tempat yang sama.”jika kami hanya berfokus pada satu tempat tersebut maka tempat lain tidak bisa terjamah oleh kita, karena terbatasnya anggaran pada tahun ini kita hanya melaksanakan 10 (sepuluh) kali dalam setahun”, tegas Rofiuddin.

Ketika sosialisasi literasi media di Purwokerto pada tanggal 6 Mei 2018, Bapak Asep Cuwantoro mengatakan, bahwa: "Siaran yang disajikan juga harus bisa dirancang untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat tentang semua hal secara benar, maka terkait dengan simbol pengkategorian, kami akan melayangkan surat teguran kepada lembaga penyiaran yang belum memakai simbol tayanga ini”.

Lembaga penyiaran lokal maupun nasional tidak memakai simbol yang dibuat oleh KPI. Melainkan menggunakan simbol yang sesuai dengan ide dari lembaga penyiaran tersebut. KPI hanya memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 pasal 55 mengenai sanksi administratif.

Semestinya KPI lebih menegaskan tentang bentuk simbol pengkalsifikasian program acara dengan bentuk atau gambar yang lebih jelas. Program yang memiliki simbol jelas akan memudahkan orang tua mengontrol tayangan keluarga di rumah. Ketika pengklasifikasian cukup jelas, akan memudahkan orang tua memberikan penjelasan kepada anak mengenai kategori tayangan televisi. Misalnya ketika orang tua tidak mendampingi anak saat menonton tayangan, anak akan mampu memilih tayangan karena sudah memiliki pengetahuan pengklasifikasian program acara televisi.

Beberapa pelanggaran seperti: acara musik yang menayangkan penyanyi yang memeragakan gaya sensual di atas panggung serta diikuti dengan aksi *bullying* yang dilakukan oleh *host*, acara tersebut ditayangkan sekitar jam 8

pagi dimana masih banyak anak-anak yang menonton televisi, lalu salah satu berita yang menayangkan perkelahian atau tawuran antar sekolahan bahkan ada juga yang menayangkan reka ulang adegan pembunuhan maupun pemerkosaan, atau misalnya iklan Gery chokholatos yang adegannya anak kecil yang masuk kulkas sambil bilang "lebih enak makan Gery didalam kulkas" adalah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPI karena dinilai akan mempunyai pengaruh buruk khususnya kepada anak-anak.

KPI menyatakan bahwa anak-anak sudah dekat sekali dengan media seperti televisi, film VCD/DVD, komik, buku, radio, majalah dan lain-lain. Menurut survei Nielsen Consumer Media View (CMV) yang menunjukkan bahwa penetrasi televisi mencapai 96 persen. Di urutan kedua media luar ruang dengan presenetasi 53 persen, internet (44 persen), dan diposisi ketiga radio (37 persen). (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/27/penetrasi-televisi-masih-yang-tertinggi. Diakses pada 09-05-2018, 11.00 WIB).

Namun, temuan yang menarik adalah keberadaan internet sebagai media dengan tingkat penetrasi cukup tinggi mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar mengakses berbagai konten melalui media digital. Padahal dalam lima tahun lalu (2012), penestrasi internet baru mencapai 26 persen. Akses internet juga meningkat di berbagai tempat, baik di kendaraan umum, kafe, tempat konser, rumah, maupun di tempat kerja.

Penggunaan internet dan videogame yang hanya pada kisaran 87% dan 70% saja. Lebih sedikit ketimbang penggunaan televisi. Dalam hitungan jam perhari, anak-anak menggunakan media itu selama 5 setengah jam setiap hari. Bahkan ada beberapa keluarga mengeluhkan anaknya menggunakan televisi dari pagi hingga malam hari. Padahal para ahli mengatakan bahwa anak-anak yang menggunakan media harusnya paling lama 2 jam per hari dan bayi di bawah umur dua tahun sangat tidak dianjurkan untuk menonton TV.

American Academy of Padiatrics mengemukakan hasil riset terhadap 87.025 anak di Inggris, Jepang, Kanada dan Amerika serikat pada tahun 1963-1978, menetapkan waktu menonton anak yang ideal adalah maksimal 2 jam/hari atau 10 jam/pekan.

Hal itu menunjukkan bahwa televisi sudah menjadi sahabat anak. Anak akan mendapat pengetahuan luas jika program yang ditonton itu bermanfaat untuk kecerdasan anak seperti tayangan pengetahuan umum, tayangan prakarya, tayangan sains, kuis anak atau tayangan kesehatan anak. Kemudian menjadi merugikan ketika menonton tayangan iklan yang kurang baik, tayangan sinetron remaja, atau tayangan animasi yang terlalu berlebihan.

Di sinilah peranan KPI untuk membuat masyarakat dan lembaga penyiaran mengenal literasi media. Menurut Potter, literasi media adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media, sedangkan Gamble dan Gamble menyebutkan bahwa literasi media adalah kemampuan untuk menginterpretasikan makna dan efek positif dan negatif dari pesan media yang kita kemukan daripada hanya menerima begitu saja gambaran-gambaran yang ditampilkan media tersebut.

Sikap reaktif sangat diperlukan dalam menggunakan media, selain sebagai *feedback* bagi lembaga penyiaran dan KPI sebagai regulator, juga sebagai panduan untuk para orang tua melindungi anak-anak dari terpaan media. Seperti pernyataan Dini Inayati berikut:

> "Kami mengharapkan masyarakat dapat menjadi *partner* dalam membangun masyarakat yang melek media. Dengan adanya reaksi dari masyarakat seperti aduan, keluhan, saran dan lain sebagainya akan membuat penyiaran di Indonesia semakin baik lagi."

Masyarakat kebanyakan menganggap hal demikian menjadi peringatan sementara semata karena hal penting bagi mereka adalah mendapatkan tontonan atau tayangan yang menghibur baginya dan keluarganya. Tetapi masyarakat tidak kritis dan kooperatif dengan KPI sebagaimana data survei KPI Januari – Juni tahun 2018 menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat kepada KPI masih sangat minim dengan jumlah rata-rata 400 aduan

perbulannya.

Padahal menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 bila bicara mengenai peran serta masyarakat dijelaskan pada pasal 52 ayat (1) yakni setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Kemudian dijelaskan di pasal yang sama ayat (3) bahwa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan. Semestinya masyarakat lebih peka ketika mendapatkan pengetahuan tentang literasi media karena mereka memiliki keluarga yang harus mendapatkan tayangan yang layak. Tidak segan untuk mengadukan isi siaran yang dianggap mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Siaran yang selama ini dinikmati masyarakat berasal dari spektrum frekuensi radio dan merupakan sumbar daya alam. Jadi seharusnya masyarakat memiliki hak frekuensi seperti yang tertera pada Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Sonakha Yuda Laksono selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Penyiaran mengenai frekuensi radio menyatakan sebagai berikut:

> "Frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas karena tidak hanya Indonesia yang menggunakan frekuensi untuk kebutuhan penyiaran yaitu mengemasnya dengan program-program dan tayangan tayangan yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu memberikan isi siaran yang informatif, mendidik, menghibur, bermanfaat untuk banyak orang serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia."(wawancara dengan Sonakha)

Sonakha lalu menambahkan bahwa masyarakat sangat mungkin untuk berperan aktif, tinggal memilih apa yang ingin dilakukan mengenai penyiaran seperti pernyataan berikut:

> "Frekuensi itu sebenarnya milik masyarakat, bukan milik lembaga penyiaran, jadi masyarakat punya hak untuk mendapatkan tayangan yang informatif, mendidik atau pun hiburan yang sehat."(tambah Sonakha)

Menurut Undang-Undang Penyiaran tentang frekuensi siaran yaitu pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan

siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Lalu spektrum frekuensi radio dijelaskan di pasal 1 ayat (8) yakni gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

Penjelasan Undang-Undang Penyiaran mengenai literasi bahwa literasi media adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan lebih bijak memilih tayangan mana yang baik untuk keluarganya, tayangan mana yang bisa diadukan kepada KPI/KPID, sama sama menciptakan budaya literat dengan mengedepankan pengetahuan dan perhatian akan masa depan anak.

Program literasi media mulai diterapkan di seluruh daerah di indonesia. KPI mempersilahkan kepada tiap-tiap KPID di seluruh daerah untuk bersama-sama mengampanyekan literasi media. Program ini akhirnya dijalankan di beberapa KPID sesuai dengan kebutuhan dan kultur budaya daerah tersebut. Misalnya KPID Jawa Tengah membuat kegiatan Literasi Media literasi.

Sejalan dengan keterangan dari Ketua Forlep Jawa Tengah yang menjelaskan bahwa kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih memuaskan atau memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya ketimbang bersikap kritis dengan mengirimkan aduan formal. Seperti keterangan berikut:

> "Sekarang itu penontonnya udah lebih cerdas, tapi kadang kala mereka tidak begitu peduli dengan hal-hal formal. Ribet. Mereka tinggal ganti *channel* kalau acara yang mereka tonton itu tidak memuaskan mereka. Mereka bebas memilih."(wawancara dengan Asep Cuswantoro)

Kebanyakan orang menganggap bahwa memilih program televisi adalah hak mereka. Kepuasan individu menjadi alasan untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi yang diterima dari media. Masyarakat di mana pun di Indonesia akan berlaku seperti itu. Masyarakat cenderung akan bergerak secara masiv ketika ada hal yang menghebohkan atau ada ajakan yang sesuai

dengan keinginan hati mereka. Lalu mengenai siaran, jelas akan bisa diarahkan untuk melakukan reaksi terhadap tayangan yang bermasalah.

Contohnya ketika Metro TV membuat pemberitaan tentang terorisme pada bulan Mei 2018 yang menyita perhatian masyarakat khususnya yang bergerak dibidang keagamaan. Dalam kasus tersebut disebutkan bahwa gerakan keagamaan adalah pintu gerbang terorisme, ditimbang dari pengamatan fisik bahwa teroris umumnya menggunakan atribut suatu agama sebagai identitas mereka seperti misalnya sorban yang digunakan untuk menutupi sebagian wajah. Hal itu menyudutkan salah satu agama yaitu Islam.

Mei 2018 KPI menerima aduan yang paling banyak dari masyarakat. Sekitar 31.563 aduan diterima KPI pusat mengenai pemberitaan Metro TV. Kemudian yang menarik adalah, mereka mampu memilih langkah yang tepat yaitu dengan tidak melakukan tindak anarkis seperti yang dilakukan oleh gerakan ekstrimis tetapi mengadukannya melalui KPI.

Paling tidak masyarakat Indonesia itu bisa diarahkan untuk melakukan reaksi terhadap sebuah permasalahan dalam hal ini dibidang penyiaran ketika mendapatkan pengetahuan tentang literasi media. Untuk itu KPID Jawa Tengah segera melakukan kampanye literasi media supaya masyarakat Jawa Tengah bisa tahu, paham, mengerti dan melakukan sesuatu yang diperlukan ketika ada tayangan yang bermasalah.

Venus menjelaskan dalam Manajemen kegiatan bahwa perencanaan yang matang sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Tim perencana kegiatan atau acara dapat merumuskan perencanaan berdasarkan lima hal, yaitu: apa yang ingin dicapai? Siapa yang akan menjadi sasaran? Pesan apa yang akan disampaikan? Bagaimana menyampaikannya? Bagaimana mengevaluasinya?

Menurut William R. Sweeney, Konsultan Utama Partai Demokrat AS, *a campaign without a plan is like a journey without a map*. Kampanye seperti sebuah perjalanan, yang dimulai dari satu titik dan berakhir pada titik lain. Fungsi utama sebuah perencanaan adalah menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan (Venus, 2004: 143).

KPID melakukan kegiatan literasi media ini untuk kemaslahatan bersama di daerah Jawa Tengah. Untuk itu perencanaan dibuat agar kegiatan yang dilakukan menjadi terarah sesuai dengan target yang ditentukan. Perencanaan juga akan membuat tim acara (panitia) tidak berpikir mengenai efek kegiatan dalam jangka waktu yang pendek tapi juga ke masa depan, hingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi kebutuhkan masa depan.

Beberapa hal lainnya mengenai perencanaan dalam mengadakan suatu kegiatan yaitu, meminimalisasi kegagalan, mengurangi konflik dan memperlancar kerjasama dengan pihak lain. Jika perencanaan dilakukan dengan baik akan menghasilkan suatu kegiatan yang baik pula.

Kegiatan Literasi Media yang di lakukan oleh KPID ditujukan bukan hanya kepada masyarakat yaitu program literasi media tetapi juga kepada lembaga penyiaran dengan melakukan sosialisasi Program Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Keduanya menjadi penting untuk membuat masyarakat Jawa Tengah menjadi melek media. Seperti pernyataan Asep Cuswantoro Wakil Ketua KPID Jawa Tengah berikut:

> "Kami melakukan kampanye menjadi dua bagian. Kalau yang ke masyarakat itu literasi media dan buat lembaga penyiaran itu sosialisasi P3SPS."(wawancara dengan Asep Cuswantoro)

KPID memulai kampanye dengan sosialisasi P3SPS lalu kemudian melakukan kegiatan literasi media kepada masyarakat. Lembaga penyiaran yang diundang untuk literasi media ini diantaranya adalah televise komersil, televisi komunitas, radio komersil dan radio komunitas dengan mengirimkan dua orang perwakilan masing-masing instansi di bidang penyiaran.

> "kami melakukan kegiatan Literasi Media di bagi menjadi dua kategori, yaitu dari kami sendiri yang mengusulkan lokasi (sesuai program kerja) atau dari masyarakat yang mengingikan adanya seminar mengenai Literasi Media. Sehingga kami di mohon untuk menjadi pembicara di acara tersebut." Wawancara dengan Bapak Rofi selaku koordinator kelembagaan bidang Literasi Media.

Merespon dinamika perkembangan media yang sangat cepat, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Semarang bersama Ikatan Alumni atau IKA PMII Semarang dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan workshop literasi media bagi kader dan anggota. Acara yang bertemakan *Kader Tashwirul Afkar: Menjadi Agen Dakwah Literasi Media* acara tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 24 Maret 2018 yang bertempatkan di aula Kantor PWNU Jawa Tengah.

Menurut Saddam Workshop literasi media ini menjadi awal dari ikhitiar gerakan literasi media PMII Semarang dalam menyikapi dinamika media massa yang sangat cepat saat ini. Pelatihan bisa menjadi hal strategis menyiapkan kader PMII Semarang menjadi agen dakwah yang menciptakan dan menyebarkan Islam damai ala Aswaja, dalam dunia nyata maupun dunia maya, terang Ketua PC PMII Semarang.

Dalam kegiatan tersebut peserta dibekali kemampuan literasi media untuk mengeksplorasi kebutuhan praktis organisasi maupun individu kader. Kader PMII Semarang selaku peserta akan diberikan materi yang berkaitan dengan teori media, konten media, seperti penulisan, grafis, dan manajemen informasi dalam media massa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menelaah isu strategis tantangan dakwah Islam Nusantara terkait literasi media bagi kader dan alumni PMII Semarang.

Acara yang diikuti 100 kader PMII Semarang tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Rofiudin komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah, dan Nur Syamsuddin selaku Ketua PC IKA PMII Semarang.

Workshop ditutup dengan deklarasi jaringan literasi media untuk dakwah Islam Nusantara Kota Semarang. Sebagai penegasan sikap PC PMII Semarang dan keluarga alumni menjadi agen literasi media untuk dakwah Islam. Kebersamaan antara PC PMII Semarang, PC IKA PMII Semarang dan KPID Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu berkontribusi dalam terwujudnya literasi media yang sehat bagi masyarakat. (observasi kegiatan literasi media pada 24 Maret 2018).

Perlu diketahui bahwa pengetahuan tentang khalayak akan membimbing peserta acara dalam merancang "pesan apa", "untuk siapa", disampaikan "lewat media apa" dan "siapa yang cocok untuk menyampaikannya". McQuail & Windahl mendefinisikan khalayak sebagai sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Namun besarnya jumlah khalayak ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki karakteristik yang beragam. Akibatnya cara mereka merespons pesan-pesan kampanye juga akan berbeda.

Begitu juga dalam Undang-Undang Penyiaran pasal 52 ayat (2) menjelaskan peran serta masyarakat bahwa organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran. Tentu harapan dari KPID adalah kampanye akan berjalan sesuai dan terarah serta berdampak positif.

Namun demikian KPID juga harus memilah siapa yang harus menerima kampanye literasi media ini. Jika tujuan utamanya adalah untuk menjadikan masyarakat melek media, berarti harus dihadirkan pula pemahaman mengenai bagaimana dan seperti apa melek media itu. Yaitu memilih khalayak yang tepat dan benar berpengaruh untuk meneruskan pesan kampanye itu tidak hanya untuk keluarga pribadinya namun juga untuk masyarakat luas.

> "sasaran kami biasanya mahasiswa, pelajar, ormas, dan masyarakat itu sendiri. Mahasiswa yang notabennya adalah *agent of social* diharapkan bisa menyalurkan materi yan di bawakan oleh kami (KPID) kepada masyarakat lebih luas lagi. Tidak menutup kemungkinan juga buat pelajar, ormas, masyarakat itu sendiri juga dapat berbagi pengetahuan ke lingkup yang kecil, missal teman sebaya, anggota ormas, maupun lingkup keluarga." Wawancara dengan bapak Muhammad Rofiuddin.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar diskusi literasi media pada Selasa 20 Maret 2018 di kampus *Institute of Pesantren Mathali'ul Falah* (IPMAFA) Pati, Diskusi bertemakan "Literasi Media di Kalangan Pelajar Mahasiswa dan Ormas".

Komisioner KPID Jawa Tengah, Sonakha Yuda Laksono mengatakan, kegiatan literasi media di kampus diharapkan mampu melibatkan mahasiswa sebagai agen literasi media. Menurutnya, KPID tak bisa bekerja sendiri. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi. Televisi maupun radio mampu mengubah pola pikir masyarakat melalui konten-konten yang disiarkan. Terlebih televisi saat ini masih favorit di kalangan masyarakat. "Laporkan jika ada acara siaran tidak berkualitas," katanya di hadapan mahasiswa.

Wakil Rektor I IPMAFA Pati, Dr. Ahmad Dimyati mengajak mahasiswa agar kritis dan ikut berkontribusi mengawal media. Lebih-lebih tahun 2018 merupakan tahun politik. Diskusi literasi ini menggandeng dua narasumber, yaitu Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Asep Cuwantoro dan Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah Ali Mansur HD.

Ali Mansur mengatakan, media memiliki fungsi informasi, pendidikan, kontrol social dan hiburan. Ia mengajak mahasiswa agar melek media, mampu memfilter informasi. Menurutnya, media massa adalah industri yang sering mengutamakan keuntungan ekonomi. Acara diproduksi untuk mendatangkan iklan. "Belum mengutamakan kualitas siaran sehingga acara berkualitas kadang malah tidak laku".

Sebaliknya, lanjut Ali, acara tidak bermutu dan tidak mendidik justru ratingnya tinggi, sehingga acara tersebut disiarkan terus menerus. "Kendalikan diri saat mengonsumsi media. jangan sampai kecanduan. Selalu kritis jangan mudah percaya dan terpengaruh isi media," tegas sekretaris komisi A DPRD tersebut.

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Asep Cuwantoro mengatakan, media secara umum lebih suka memberitakan *bad news is good news*. Berita yang disampaikan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis dan sadis. Media yang dikelola swasta kontennya cenderung diarahkan pada kepentingan bisnis dan pemilik. Terkait penyiaran sudah ada regulasi yang mengatur. Ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang bisa dijadikan acuan. Bagi lembaga penyiaran, P3SPS sebagai

acuan produksi. Bagi KPI sebagai pedoman untuk memantau, mengawasi dan menindak. Sedangkan bagi masyarakat bisa dijadikan acuan untuk mengadu. (observasi kegiatan literasi media di Pati pada 20 Maret 2018).

Kemudian kegiatan yang selanjutnya dilakukan dalam fungsi perencanaan menurut Louis A. Allen adalah penjadwalan (*scheduling*) yaitu penentuan waktu yang tepat melalui penyusunan jadwal kegiatan, kapan harus dimulai dan berapa lama setiap aktivitas yang dikerjakan. Dengan penyusunan jadwal kegiatan kampanye ini akan memudahkan pelaksanaan kampanye nantinya. Muhibuddin mengatakan bahwa dalam menentukan jadwal pelaksanaan kampanye dilakukan dengan pembicaraan dengan para komisioner KPID secara tertutup.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan kampanye literasi media ini adalah program KPI pusat, maka KPI dijadwalkan untuk mengisi materi tentang literasi media. Didalamnya akan ada contoh-contoh siaran bermasalah, survei tentang permasalahan tayangan atau penyiaran dan bagaimana solusi yang mungkin dilakukan lembaga penyiaran maupun masyarakat.

Sedangkan KPID memberi pemaparan mengenai bahan yang akan diberikan pada saat sosialisasi, Asep Cuswantoro menjelaskan sebagai berikut:

> "Nanti kami tampilkan potongan-potongan tayangan yang tidak sehat itu seperti apa." Kita juga biasannya menggunakan metode wayang dan kartun, seperti yang sudah dilaksanakan di salah satu pondok pesantren Salatiga dengan menggunakan metode wayang" tambah pak Rofi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar kegiatan literasi media di Kampus UIN Walisongo pada Senin 9 Maret 2018. Ada yang beda dengan kegiatan literasi media yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah di Kampus UIN Walisongo ini, kegiatan literasi media kali ini menggandeng Rumah Rupa Walisongo. Selain diskusi, ada pameran kartun yang menampilkan hasil karya mahasiswa UIN Walisongo di auditorium 2 Kampus 3. Karya yang dipajang merupakan gambaran media dewasa. Karya M Khabib Zamzami misalnya. Mahasiswa

Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu menampilkan visual tim orkestra dengan dua musisi dan satu dirigen. Sosok musisi digambarkan dengan kepala berbentuk televisi. Ada logo sebuah partai di layar televisi tersebut. "Arahkan pandanganmu ke depan…" demikian kutipan lagu yang dilantunkan orkestra tersebut.

Ada pula gambar yang menampilkan visual televisi yang menyajikan kekerasan. Adegan kekerasan di televisi digambarkan dalam simbol kepalan tangan. Sementara seorang anak duduk menyaksikan. Karya tersebut adalah goresan Abdulloh Ibnu Thalhah, Dosen Seni UIN Walisongo.

Komisioner KPID Jawa Tengah M Rofiuddin mengatakan, UIN saat ini memiliki jurusan seni rupa. Butuh arena untuk menyalurkan hobi di bidang seni. "KPID punya misi agar masyarakat bisa melek media. Mendorong masyarakat mengkritik media. Salah satunya melalui senirupa". Sebagai sumber informasi, televisi memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Ia mengajak mahasiswa agar lebih kritis terhadap media, apakah informasinya bisa dipercaya atau tidak? Terlebih ada televisi yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Tentu kontennya cenderung menguntungkan si pemilik. "Media televisi tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Sebab, televisi dan radio menggunakan frekuensi publik" tegas Komisioner KPID Jawa Tengah itu.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Drs Wahyudi, M.Pd. mengapresiasi kegiatan pameran dan seminar Literasi Media. Menurutnya, kritik media melalui gambar cukup efektif. Misalnya mengkritik ada televisi yang jadi juru bicara partai. (observasi kegiatan literasi media dengan media kartun di UIN Walisongo Semarang).

Dalam kurun waktu satu tahun, semua zona akan didatangi untuk diberikan sosialisasi literasi media. Untuk lebih menguatkan kampanye tersebut Muhibuddin mengharapkan adanya pastisipasi dari masyarakat. Seperti yang dikatakannya berikut:

> "Diharapkan masyarakat, siapapun itu, turut berpartisipasi, minimal di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Jadi dia

> juga memberikan pemahaman kepada anak-anaknya misalnya, atau kepada adik-adiknya atau kepada siapapun."

Bicara mengenai kegiatan, pasti bicara soal *budgeting* atau penganggaran dana. Bahwa anggaran dana yang dipakai KPID untuk kegiatan adalah berasal dari APBD. Jadi sebenarnya program kegiatan ini sangat bergantung kepada anggaran yang akan dipakai. Sebisa mungkin dimanfaatkan ketika anggaran program kegiatan literasi media ini turun dan digunakan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan Literisai Media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam rangka Hari Penyiaran Nasional Ke-85 Tahun 2018. Hari Penyiaran Nasional menjadi sebuah momentum dalam rangka memaksimalkan literasi dan sosialisasi kepada publik tentang pentingnya penyiaran. Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto, melibatkan seluruh insan radio dan televisi lokal yang ada di Kabupaten Banyumas, serta diisi dengan berbagai acara hiburan, lomba, dan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Asep Cuwantoro memberikan apresiasi kepada LPP RRI Purwokerto dan semua radio siara swasta anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang ada di Purwokerto karena telah menggelar kegiatan peringatan Hari Penyiaran Nasional dengan berbagai acara yang menarik.

> "Saya berharap ada pembelajaran melalui peringatan Hari Penyiaran Nasional agar masyarakat mendengarkan siaran radio dan menonton televisi tidak ditelan mentah-mentah. Kenapa harus mengadakan acara literasi media? Karena saya pikir semua orang kini sudah melek media. KPID berharap semua kritis dalam menyerap informasi dari media, termasuk dari radio. (wawancara dengan Asep Cuswantoro).

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Banyumas Joko Wiyono memandang perlu menggelar kembali literasi media pada masa mendatang agar saling sinergi antara seluruh stasiun radio dan televisi. Dengan demikian, di antara stasiun radio dan televisi akan ada satu persepsi, yaitu tidak menyiarkan hoaks. Siaran yang disajikan juga harus bisa

dirancang untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat tentang semua hal secara benar.

Koordinator Kegiatan Literasi Media Anjar Tri Asmara mengharapkan masyarakat dapat memahami bahwa insan radio dan televisi lokal di Banyumas masih eksis, sangat kompak, dan bersatu untuk membuat kegiatan bersama. Walaupun memiliki latar belakang dan segmen yang berbeda, menurut dia, media radio dan televisi lokal dapat diandalkan sebagai media yang terpercaya dalam menyampaikan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Ini sekaligus momentum bagi insan penyiaran Jawa Tengah untuk menguatkan kembali semangat menjaga siaran yang sehat serta berkualitas, selain itu peringatan Hari Penyiaran Nasional Ke-85 Tahun 2018 diharapkan dapat memasyarakatkan penyiaran sehat dan pentingnya melek media kepada masyarakat, hal itu disebabkan penyebaran hoaks dari sumber-sumber yang tidak jelas saat sekarang mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tayangan televisi saat ini cenderung memihak pada kepentingan industri. Talkshow dan iklan dikemas bukan untuk memberikan manfaat bagi publik tetapi justru untuk keuntungan industri. Diskusi bertajuk "Bijak Menonton Tayangan Layar Kaca di Kalangan Bankom Polrestabes Semarang" itu diikuti oleh puluhan anggota Bantuan Komunikasi (Bankom) Polrestabes Semarang. Komisioner KPI Pusat Mayong Suryo Laksono dan Presiden Direktur Dreamlight World Media, Eko Nugroho didapuk sebagai narasumber. Budi menyampaikan, kegiatan literasi media merupakan bagian program KPID yang sangat penting. Sebagai regulator penyiaran, KPID selalu berupaya agar masyarakat bisa melek media. Menurutnya, peran masyarakat sangatlah penting. Untuk itu KPID bekerjasama dengan masyarakat untuk mengawasi konten-konten televisi. Tak hanya televisi, tetapi juga radio.

Komisioner KPI Pusat Mayong Suryo Laksono menjelaskan, lembaga penyiaran televisi dan radio harus diatur karena menggunakan frekuensi publik. Dia menyebutkan, ada regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang

No. 32/2002 tentang Penyiaran. UU tersebut mengamanatkan adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator. Namun, aturan tersebut sudah 15 tahun dan tidak relevan lagi. Saat ini sedang direvisi dan belum selesai. Banyak hal kalau tak diawasi berisiko, akan berdampak pada keseluruhan bangsa ini. Idealnya KPI memegang mandat supaya kualitas siaran terjaga, Selain memiliki peran mengatur, lanjut Mayong, KPI juga mengapresiasi dan memberikan sanksi. KPI menerapkan memiliki buku acuan berupa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk lembaga penyiaran. Meski demikian, perkembangan media saat ini cukup pesat. Televisi dan radio kalah jauh dengan media baru yang memanfaatkan internet. "KPI idealnya mengatur informasi yang muncul melalui gadget. Hanya saja belum ada regulasinya," katanya. Mayong juga mengingatkan, media sosial berada di luar jangkauan KPI. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu ia mengajak agar masyarakat bisa menfilter informasi yang beredar. Sementara itu Presiden Direktur Dreamlight World Media Eko Nugroho mengajak anggota Bankom agar kritis melihat tayangan televisi. Juga informasi yang beredar di internet. Dia menyebutkan ada miliaran video yang diunggah di internet. Untuk itu ia mengajak agar berhati-hati mengonsumsi.

Ketua Bankom Polrestabes Semarang Giri Purdyanto berharap, tim Bankom bisa mengomunikasikan literasi media kepada masyarakat luas. "Informasi saat ini luar biasa. Kalau tidak memfilternya, nilai budaya kita akan hilang. Harus kita jaga," katanya. Giri mengatakan, saat ini Bankom memiliki angggota lebih dari 100 personil. Juga memiliki anggota halaman Facebook lebih dari 10 ribu. Kita manfatkan untuk menyebarkan informasi positif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Literasi Media yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dimana merupakan turunan dari kegiatan sosialisasi literasi media oleh KPI pusat. Kegiatan ini dibuat berdasarkan kebutuhan, kultur budaya dan pengamatan dari daerah. Maka kegiatan ini sangat penting untuk kemajuan daerah dan Bangsa. Apalagi saat ini kita sedang mengalami masa penyebaran informasi yang sangat cepat. Oleh karenanya kegiatan ini terdapat ketentuan penyiaran yang bertujuan menjadikan masyarakat dan lembaga penyiaran menjadi melek media.

Dalam penelitian ini kegiatan Literasi Media yang dilakukan KPID dalam bentuk sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran dan literasi media kepada masyarakat didapati bahwa telah terjadi proses kegiatan yang cukup baik.

Perencanaan, pelaksanaan dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan ini memiliki beberapa faktor penghambat dan faktor penunjang. sebagaimana diketahui bahwa kegiatan Literasi Media ini akan berjalan dengan baik ketika semua pihak saling mendukung, dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Tengah melewati proses perencanaan yang sesuai dengan alur perencanaan kegiatan sosialisasi. Sebelum proses sosialisasi itu berlangsung telah dilakukan riset oleh KPID mengenai fenomena penyiaran di daerah Jawa Tengah. Saat perencanaan, beberapa aspek yang diperhatikan yaitu fenomena sosial, target waktu yang tepat, sumber daya yang dibutuhkan, strategi atau pola komunikasi yang digunakan, situasi, tempat pelaksanaan dan cara penyampaian.
2. Proses pelaksanaan kegiatan literasi media ini dilakukan dengan menghadirkan lembaga penyiaran dan masyarakat di waktu yang berbeda

sesuai dengan kebutuhan sosialisasi dalam kegiatan itu. Lembaga penyiaran mendapatkan penjelasan mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan masyarakat mendapatkan penjelasan tentang literasi media. Dalam pelaksanaan KPID beserta KPI menjelaskan materi dengan mengedepankan visi menjadikan daerah Jawa Tengah melek media. Materi yang disampaikan yaitu penjelasan program literasi media, contoh tayangan buruk, contoh siaran radio yang buruk, contoh tayangan baik, contoh iklan berpengaruh dan pemahaman mengenai melek media.

3. Memiliki hambatan dalam kekuatan literasi media di televisi local Jawa Tengah belum sesuai dengan seperti yang tertera pada Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. Kekuatan kampanye diukur dari seberapa berpengaruhnya program literasi media terhadap televisi lokal Jawa Tengah. Televisi lokal memang telah menjalankan tayangan dengan mengangkat kearifan budaya lokal. Tidak banyak tayangan lokal yang menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun televisi lokal belum menaati sepenuhnya kewajiban yang disebutkan dalam P3SPS salah satunya yaitu pengkategorian program acara berdasarkan symbol yang dibuat oleh KPI.
4. Kegiatan literasi media yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah tidak memiliki alur visual yang tergambarkan dengan jelas sehingga dapat menghambat kinerja. Padahal dengan upaya memvisualisasikan alur kegiatan, maka KPID akan lebih mudah melakukan kegiatan literasi media dengan efektif dan terarah.

B. Saran

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kegiatan literasi media Jawa Tengah KPID Jawa Tengah berjalan dengan baik dan proses kegiatan yang dilakukan KPID sesuai dengan alur seperti yang dikehendaki. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh KPID terkait dengan tindak lanjut atau evaluasi kegiatan kegiatan literasi media, seperti hal berikut:

1. Proses kegiatan ini sebaiknya lebih diperbanyak sasarannya mengingat

begitu pentingnya literasi media pada era infomasi seperti sekarang ini. KPID bisa memperluas cakupan kegiatan tersebut ketika sudah disebarkan informasinya.

2. Harusnya KPID cepat dan memasang target waktu untuk membuat masyarakat menjadi melek media. menindaklanjuti dengan intens kepada lembaga penyiaran dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi literasi media.

Membuat visualisasi dengan baik secara jelas alur kegiatan sosialisasi literasi media yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Tengah. Karena dalam prosesnya salah satu tujuannya adalah mensosialisasikan kepada lembaga penyiaran dan masyarakat dan penerapannya hingga menjadikan masyarakat dan lembaga penyiaran menjadi melek media.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah selalu dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung atas terselesainya skripsi ini. Adapun kekurangan skripsi ini baik dari segi subtansi maupun pemilihan kata, marilah dijadikan bahan koreksi untuk dijadikan studi ulang. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rinekacipta.

Azwar, Saifudin, 2011. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baran, Stanley. J & Dennis K. Davis. 2010. Teori Dasar, Komunikasi Pergolakan, dan Masa Depan Massa. Jakarta: Salemba Humanika.

Baran, Stanley J. 1999. Introducing to Mass Communication Media Literacy and Culture. California, California: Mayfield Publishing Company.

Budhijanto, Danrivanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi,* Bandung: PT Refika Aditama.

Cresweell, John W. 1998, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Depag, RI, 1989, *Al-Qur'an Terjemah*. Semarang: Toha Putra.

Dominick, joseph R. 2000. The Dynamics Of Mass Communication. New york: Random House.

Effendy, Onong Uchjana. 2013. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Fahmi Irham, 2012. Manajemen Teori,kasus dan solusi, PT Al fabeta, Bandung

Fajar Marhaeni, 2009, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. Jakarta. Graha Ilmu.

Herdiansyah, Haris, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hs Lasa, 2009, Manajemen Perpustakaan Sekolah, PT Pinus Book Publisher, Yogyakarta.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga.

Iriantara, Yosal. 2013. Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana. Bandung. Simbiosa Rekatama Media.

Liweri, Alo. 1991. *Memahami Peran Komunikasi Massa dalam Masyarakat.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Mahi M. Hikmat. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moleong, Lexi. J, 2007. *Metodeologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda karya.

Morissan, dkk. 2010. Teori Komunikasi Massa.Bogor: Ghalia Indonesia

Nasution, Zulkarimein. 1993. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Jakarta: Universitas terbuka.

Nurudin. 2006. Pengantar Komunikasi Massa. Malang. Raja Grafindo.

Potter,W.J. 2005. Media Literacy. Upper Sadler River,NJ: Prentice Hall.

Rochimah, Tri Hastuti Nur. 2013. Media Parenting: Panduan Memilih Media bagi Anak di Era Informasi. Yogyakarta. Mata Padi Pressindo.

Santoso, Edi dan Mite Setiansah. 2010. Teori Komunikasi. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sanwar, Aminuddin. 2009. Ilmu Dakwah; Suatu Pengantar Studi Semarang: Gunungjati

Sarosa, Samija, 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: Permata Puri Media

Severin, Werner J & James W. Tankard, Jr. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah Metode, dan Terpaan di Dalam Media Massa. Jakarta. Prenada Kencana Grup.

Siswanto H.B, 2011, Pengantar Manajemen , PT Bumi Aksara, Jakarta.

Soewadi, Jusuf, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana

Steele, R. L. (2009). Traditional and New Media. Dalam W. F. Eadie (Eds), *21st Century Communication A Reference Handbook* (pp. 489-496). SAGE Publications, Inc.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuan, kual dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Buku Panduan Program Sarjana dan Diploma. 2016. Buku Panduan Program Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2016/2017. Semarang: UIN Walisongo.

Wahidin dkk, 2006. *Filter Komunikasi Elektronika*, Yogyakarta

West, Richard & Lyan H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi: Analisis & Aplikasi. Jakarta. Salemba Humanika.

JURNAL

Lutviah. 2011. Pengukuran Tingkat Literasi Media Berbasis Individual Competence Framework: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Paramadina. Jurnal Universitas Paramadina, I.K.

RIWAYAT HIDUP

NAMA	: MUHAMMAD ASEP BACHTIAR
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: BREBES, 31 AGUSTUS 1993
NIM	: 121211069
JURUSAN/ FAKULTAS	: KOMUNIKASI DAN PENYIARA ISLAM/ DAKWAH DAN KOMUNIKASI
ALAMAT	: JALAN BAWANG MERAH SELATAN NO. 44 KALIGANGGSA WETAN BREBES
TINGGI BADAN	: 173 CM
GOL. DARAH	: B

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD N 03 KALIGANGGSA WETAN BREBES
   LULUS TH 2005
2. SMP N 04 BREBES
   LULUS TH 2008
3. MA N KOTA TEGAL
   LULUS TH 2011

MOTTO HIDUP : KEJARLAH MIMPIMU

DRAF WAWANCARA

1. Bagaimana Kegiatan Literasi Media di KPID Jawa Tengah?
2. Seperti apa strategi kegiatan Literasi Media KPID Jawa Tengah?
3. Siapa saja target atau sasaran dalam kegiatan literasi media ini?
4. Siapa saja aktor yang terlibat dalam kegiatan ini?
5. Seperti apa mekanisme yang digunakan dalam kegiatan ini?
6. Bagaimana penjadwalan kegiatan literasi media oleh KPID Jawa Tengah?
7. Bagaimana pola penjadwalan dalam pelaksanaan kegiatan Literasi media KPID Jawa Tengah?
8. Bagaimana aturan yang diterapkan KPID ketika melaksanakan kegiatan literasi media
9. Pedoman apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan literasi media?
10. Bagaimana anggota KPID mengaplikasikan kegiatan literasi media
11. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan literasi media ini?
12. Bagaimana pola pembatasan dalam kegiatan literasi media?
13. Bagaimana cara menentukan hasil kegiatan literasi media?
14. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan literasi media oleh KPID?
15. Bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan literasi media oleh KPID?
16. Pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh anggota KPID dalam kegiatan literasi media?
17. Tolak ukur apa yang digunakan oleh KPID dalam kegiatan literasi media?
18. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan literasi media?

Wakil Ketua KPID

1. Metode seperti apa yang digunakan dalam kegiatan literasi media ini?
2. Bagaimana respon dari masyarakat?
3. Harapan apa saja untuk masyarakat setelah adanya kegiatan ini?
4. Pesan apa saja yang disampaikan kepada masyarakat?
5. Visualisasi seperti apa yang digunakan dalam kegiatan ini?